



LKJIP TAHUN 2022
BADAN PERENCANAAN, PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
DAERAH KABUPATEN SAMPANG

2022

BADAN PERENCANAAN, PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

Jl. Jamaluddin No. 1-B Telp. (0323) 321538 Fax. 323709
Email : bappelitbangda@sampangkab.go.id Website : bappelitbangda.sampangkab.go.id
SAMPANG (69213)

N O.	TUJUAN/SASARAN	INDI KAT OR
1	2	3
	Tujuan 1:	
	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	Nilai Pere Nilai Peng
	Sasaran 1:	
1	Meningkatnya kualitas perencanaan dan pengendalian program	Perse ntase PD deng
	Sasaran 2:	
2	Meningkatnya Kualitas Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Perse ntase Capai an Indik

N O	SASARAN STRATEGIS	
1	Meningkatnya kualitas perencanaan dan pengendalian program	1
2	Meningkatnya Kualitas Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	2

Uraian		
1	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	a b
1	Meningkatnya kualitas perencanaan dan pengendalian program	a
2	Meningkatnya Kualitas Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	b

Uraian		
1	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	a

INDIKATOR KINERJA	TARGET
Persentase Perangkat Daerah dengan Kualitas Dokumen Perencanaan Baik Kriteria Baik: <ul style="list-style-type: none"> a. Berorientasi pada Hasil b. Target Jelas c. Indikator SMART d. Konsistensi dengan RPJMD/Renstra 	81%
Persentase Capaian Indikator kinerja Sasaran Renstra Perangkat Daerah \geq 80%	81%

Sasaran		Realisasi Tahun 2021	Tahun 2022		% Capaian
Indikator Kinerja	Satuan		Target	Realisasi	
Nilai Perencanaan Kinerja Daerah	%	78.97	79	80.5	101.90
Nilai Pengukuran Kinerja Daerah	%	69	70	70	100
Persentase Perangkat Persentase PD dengan kualitas Dokumen Perencanaannya Baik	%	100	81	84.62	104.47
Persentase Capaian Indikator kinerja Sasaran RENSTRA Perangkat Daerah \geq 80%	%	93.96	81	84.62	104.47

Sasaran		Realisasi Tahun 2021	Tahun 2022		% Capaian
Indikator Kinerja	Satuan		Target	Realisasi	
Nilai Pengukuran Kinerja Daerah	%	69	70	70	100.00

Kategori

Sangat
Tinggi

Sangat
Tinggi

Sangat
Tinggi

Sangat
Tinggi

Kategori

Sangat
Tinggi



Kata Pengantar

Puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT. yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BAPPELITBANGDA) Kabupaten Sampang Tahun 2022 dapat tersusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban atas kinerja yang telah ditetapkan.

LKjIP BAPPELITBANGDA Kabupaten Sampang Tahun 2022 merupakan bagian dari implementasi transparansi dan akuntabilitas kinerja yang disusun berdasarkan sasaran Renstra BAPPELITBANGDA Kabupaten Sampang yang diturunkan ke Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan sebagai penjabaran atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024. Dengan tersusunnya LKjIP ini diharapkan sebagai bagian dari upaya untuk terciptanya *good governance* sebagai tuntutan bagi terselenggaranya manajemen pemerintahan dan pembangunan yang baik untuk mewujudkan pelayanan masyarakat khususnya dalam bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah bekerja keras dan bekerjasama dengan baik dalam penyusunan LKjIP ini dan semoga LKjIP BAPPELITBANGDA Kabupaten Sampang Tahun 2022 ini dapat menjadi sumber informasi dan referensi untuk penyusunan perencanaan, perbaikan dan peningkatan kinerja pada waktu yang akan datang

Sampang, Januari 2023
Kepala Bappelitbangda Kab. Sampang



Ir. UMI HANIK LILIA, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19661202 199303 2 004



BAB I

PENDAHULUAN

A. UMUM

Pembangunan Daerah merupakan salah satu sub sistem dari pembangunan nasional yang meliputi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang ditujukan untuk meningkatkan harkat, martabat dan memperkuat jati diri serta kepribadian masyarakat dalam pendekatan lokal, nasional dan global. Dalam perspektif perencanaan pembangunan, Pemerintah Daerah harus memperhatikan keseimbangan berbagai aspek dalam satu kesatuan wilayah pembangunan ekonomi, hukum, sosial, budaya, politik, pemerintahan dan lingkungan hidup

untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan, dengan diikuti oleh penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel (*Good Governance*).

Pemerintahan yang akuntabel merupakan kewajiban yang perlu dilaksanakan dalam usaha mewujudkan visi misi pembangunan daerah dan aspirasi serta cita-cita masyarakat dalam mencapai masa depan yang lebih baik. Berkaitan dengan hal itu, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan terukur, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna,



BAPPELITBANGDA KABUPATEN SAMPANG

serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Amanah Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara negara mulai dari pejabat eselon II ke bawah untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya yang dipercayakan padanya berdasarkan Rencana Strategis (RENSTRA) yang dirumuskan sebelumnya yaitu melalui penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman penyusunan penetapan kinerja dan pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, disebutkan bahwa laporan akuntabilitas kinerja adalah laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Laporan akuntabilitas kinerja berisi ikhtisar pencapaian sasaran yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dan dokumen perencanaan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Bappelitbangda

Kabupaten Sampang Tahun 2021, merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Bappelitbangda Kabupaten Sampang sebagai salah satu penyelenggara Pemerintahan Kabupaten Sampang dalam kerangka integrasi perwujudan Visi dan Misi Bappelitbangda Kabupaten Sampang. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini merupakan instrumen dan metode pertanggungjawaban pemerintah yang pada intinya mengungkapkan target perencanaan, pelaksanaan, dan pengukuran kinerja serta evaluasi dan analisa atas capaian kinerja hasil pelaksanaan tahun sebelumnya. LKjIP menjelaskan faktor-faktor keberhasilan atau kegagalan atas capaian realisasi target kinerja Bappelitbangda Kabupaten Sampang melalui pengelolaan sumber daya yang berbasis kinerja sebagai bagian dari pemenuhan kewajiban yang bersifat transparansi dan akuntabilitas.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini disusun dengan maksud menginformasi pertanggungjawaban Bappelitbangda Kabupaten Sampang secara akuntabel dalam pelaksanaan tugas dan fungsi serta perannya dalam penggunaan anggaran dan kebijakan yang diamanatkan kepada instansi



BAPPELITBANGDA KABUPATEN SAMPANG

pemerintah berdasarkan perencanaan strategis yang ditetapkan.

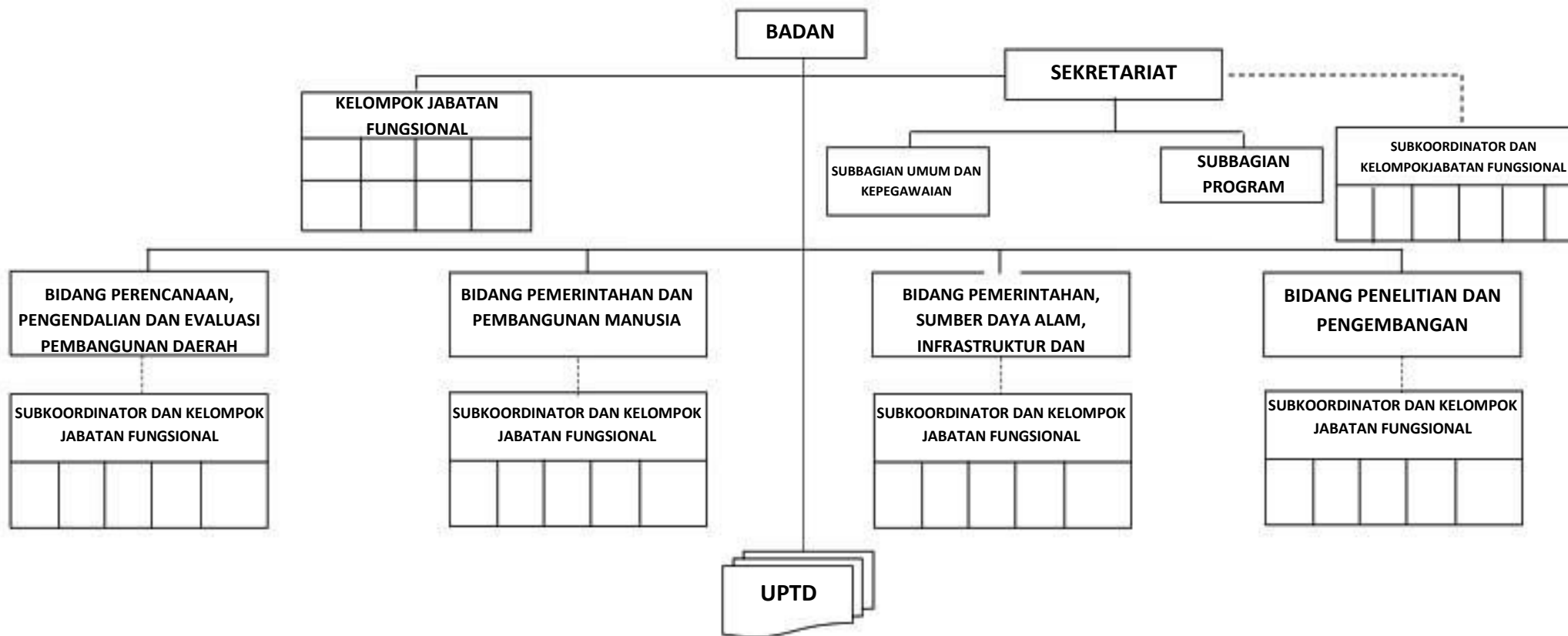
Adapun tujuannya adalah Memberikan informasi mengenai kinerja Bappelitbangda Kabupaten Sampang dan sebagai bahan evaluasi Kinerja Bappelitbangda Kabupaten Sampang dan diharapkan dapat diperoleh masukan dalam rangka memperbaiki kinerja Bappelitbangda Kabupaten Sampang dimasa yang akan datang.

B. STRUKTUR ORGANISASI BAPPELITBANGDA KABUPATEN SAMPANG

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati No. 9 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sampang, Bappelitbangda Kabupaten Sampang terdiri dari 1 Kepala Badan, 1 Sekretaris, 4 Kepala Bidang, 3 Sub Bagian, 12 Sub Bidang. dengan bagan sebagai berikut :



BAPPELITBANGDA KABUPATEN SAMPANG



Sumber : Bappelitbangda Kabupaten Sampang, 2022

Gambar 2.1
Susunan Organisasi Bappelitbangda Kabupaten Sampang



C. TUGAS DAN FUNGSI BAPPELITBANGDA KABUPATEN SAMPANG

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan daerah Daerah (Bappelitbangda) merupakan unsur perencana penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dipimpin oleh Kepala Badan, berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Bappelitbangda memiliki kedudukan dan struktur organisasi:

1. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah merupakan unsur penunjang urusan Pemerintahan bidang Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan;
2. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten;
3. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan serta tugas pembantuan; dan
4. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah dalam melaksanakan tugas dan menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyusunan kebijakan teknis bidang Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan;
 - b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan;
 - c. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan;
 - d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah bidang Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan; dan
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Susunan organisasi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah terdiri atas :

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat, membawahi :
 - ❖ Sub Bagian Program;
 - ❖ Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - ❖ Sub Bagian Keuangan;
- c. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, membawahi :
 - ❖ Sub Bidang Perencanaan dan Pendanaan
 - ❖ Sub Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan;
 - ❖ Sub Bidang Data dan Informasi.
- d. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, membawahi :
 - ❖ Sub Bidang Pembangunan Manusia



BAPPELITBANGDA KABUPATEN SAMPANG

- ❖ Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat;
- ❖ Sub Bidang Pemerintahan.
- e. Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan, membawahi :
 - ❖ Sub Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
- ❖ Sub Bidang Permukiman dan Perumahan;
- ❖ Sub Bidang Prasarana Wilayah.
- f. Bidang Penelitian dan Pengembangan, membawahi :
 - ❖ Sub Bidang Penelitian Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya;
 - ❖ Sub Bidang Penelitian Bidang Ekonomi dan Pembangunan;
 - ❖ Sub Bidang pengembangan Inovasi dan Teknologi.
- g. UPTD Badan; dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

TUGAS DAN FUNGSI Sekretariat

- a. Sekretariat mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh unit kerja yang meliputi program dan pelaporan, umum dan kepegawaian serta keuangan;
- b. Dalam hal untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi:
 - ❖ pengoordinasian kegiatan pada Badan;
 - ❖ pengoordinasian dan penyusunan rencana, program, dan anggaran pada Badan;
 - ❖ penyusunan kerangka regulasi pada Badan;
 - ❖ pembinaan dan pemberian dukungan administrasi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi Badan;
 - ❖ penyusunan rancangan kebijakan penataan organisasi Badan
 - ❖ penyelenggaraan pengelolaan barang milik Daerah dan layanan pengadaan barang/jasa di lingkup Badan;
 - ❖ pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pada Badan; dan
 - ❖ pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Sub Bagian Program, mempunyai tugas :

- ❖ menyiapkan bahan pengoordinasian penyusunan program, monitoring, evaluasi dan pelaporan Badan;
- ❖ melaksanakan pengelolaan hubungan masyarakat;
- ❖ mengelola penyusunan perencanaan anggaran Badan;
- ❖ mengelola situs web Badan;
- ❖ melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan Sub Bagian Program; dan



- ❖ melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas :

- ❖ melaksanakan pengelolaan rumah tangga dan tata usaha Badan;
- ❖ melaksanakan pengelolaan barang/jasa Badan;
- ❖ melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rancangan produk hukum;
- ❖ melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan penataan organisasi Badan;
- ❖ melaksanakan pengelolaan layanan administrasi kepegawaian Badan;
- ❖ melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
- ❖ melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris

Sub Bagian Keuangan, mempunyai tugas :

- ❖ melaksanakan penatausahaan keuangan Badan;
- ❖ melaksanakan penyusunan pelaporan keuangan Badan;
- ❖ melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan Sub Bagian Keuangan; dan
- ❖ melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

- a. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan penyusunan perencanaan, pengendalian dan evaluasi serta pengelolaan data dan informasi pembangunan daerah;
- b. Dalam hal melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah mempunyai fungsi:
 - ❖ penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD), dokumen rencana perangkat daerah (Renstra dan Renja) dan merumuskan bahan rencana pendanaan pembangunan non APBD Kabupaten Sampang;
 - ❖ pengintegrasian, harmonisasi dan sinergitas kegiatan perangkat daerah, provinsi, kementerian/lembaga, unsur masyarakat, akademisi dan swasta;
 - ❖ pelaksanaan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, pengendalian dan evaluasi perangkat daerah, serta pengendalian dan evaluasi pendanaan non APBD Kabupaten Sampang;
 - ❖ penyajian data dan informasi perencanaan pembangunan daerah serta pengendalian sistem data dan informasi pembangunan daerah;
 - ❖ pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah; dan
 - ❖ pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Sub Bidang Perencanaan dan Pendanaan mempunyai tugas :

- ❖ menyiapkan bahan penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
- ❖ menyiapkan bahan penyusunan dokumen rencana perangkat daerah (Renstra dan Renja);



- ❖ menyiapkan bahan perumusan rencana pendanaan pembangunan non APBD Kabupaten Sampang;
- ❖ menyiapkan bahan integrasi, harmonisasi dan sinergitas kegiatan perangkat daerah kabupaten, provinsi, kementerian/lembaga, unsur masyarakat, akademisi dan swasta;
- ❖ melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan Sub Bidang Perencanaan dan Pendanaan; dan
- ❖ melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah.

Sub Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas :

- ❖ menyiapkan bahan penyusunan laporan hasil pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah;
- ❖ menyiapkan bahan penyusunan laporan hasil pengendalian dan evaluasi perangkat daerah;
- ❖ menyiapkan bahan penyusunan laporan hasil pengendalian dan evaluasi pendanaan non APBD Kabupaten Sampang;
- ❖ menyiapkan bahan integrasi, harmonisasi dan sinergitas kegiatan dengan perangkat daerah, provinsi, kementerian/lembaga, unsur masyarakat, akademisi dan swasta dalam penyusunan dokumen pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah;
- ❖ melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan Sub Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan; dan
- ❖ melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah.

Sub Bidang Data dan Informasi mempunyai tugas :

- ❖ menyiapkan bahan penyajian data dan informasi hasil perencanaan pembangunan daerah;
- ❖ menyiapkan bahan pengendalian penerapan sistem data dan informasi pembangunan daerah;
- ❖ menyiapkan bahan integrasi, harmonisasi dan sinergitas kegiatan perangkat daerah, provinsi, kementerian/lembaga, unsur masyarakat, akademisi dan swasta dalam pengelolaan data;
- ❖ melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan Sub Bidang Data dan Informasi; dan
- ❖ melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

- a. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan penyusunan bahan perencanaan, laporan hasil pengendalian dan evaluasi serta pengelolaan data dan informasi lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- b. Dalam hal melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia mempunyai fungsi:
 - ❖ penyusunan bahan rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) dan rencana perangkat daerah (Renstra dan Renja) lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan



Manusia;

- ❖ pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah dan perangkat daerah lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- ❖ pengelolaan data dan informasi pembangunan sektoral sebagai bahan penyusunan rencana, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- ❖ pengintegrasian, harmonisasi dan sinergitas kegiatan perangkat daerah, provinsi, kementerian/lembaga, unsur masyarakat, akademisi, swasta dan desa lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- ❖ pembinaan teknis perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah serta pengelolaan data dan informasi kepada perangkat daerah lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- ❖ pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia; dan
- ❖ pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Sub Bidang Pembangunan Manusia mempunyai tugas :

- ❖ menyiapkan bahan penyusunan rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) dan rencana perangkat daerah (Renstra dan Renja) lingkup Sub Bidang Pembangunan Manusia;
- ❖ menyiapkan bahan pengendalian dan evaluasi terhadap pembangunan daerah dan perangkat daerah lingkup Sub Bidang Pembangunan Manusia;
- ❖ menyiapkan bahan pengelolaan data dan informasi pembangunan sektoral sebagai bahan penyusunan rencana, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah lingkup Sub Bidang Sumber Daya Manusia;
- ❖ menyiapkan bahan integrasi, harmonisasi dan sinergitas kegiatan perangkat daerah, provinsi, kementerian/lembaga, unsur masyarakat, akademisi dan swasta lingkup Sub Bidang Pembangunan Manusia;
- ❖ menyiapkan bahan pembinaan teknis perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah serta pengelolaan data dan informasi kepada perangkat daerah lingkup Sub Bidang Pembangunan Manusia;
- ❖ melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan Sub Bidang Pembangunan Manusia; dan
- ❖ melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia.

Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas :

- ❖ menyiapkan bahan penyusunan rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) dan rencana perangkat daerah (Renstra dan Renja) lingkup Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat
- ❖ menyiapkan bahan pengendalian dan evaluasi terhadap pembangunan daerah dan perangkat daerah lingkup Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat;



- ❖ menyiapkan bahan pengelolaan data dan informasi pembangunan sektoral sebagai bahan penyusunan rencana, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah lingkup Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat;
- ❖ menyiapkan bahan integrasi, harmonisasi dan sinergitas kegiatan perangkat daerah, provinsi, kementerian/lembaga, unsur masyarakat, akademisi dan swasta lingkup Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat;
- ❖ menyiapkan bahan pembinaan teknis perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah serta pengelolaan data dan informasi kepada perangkat daerah lingkup Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat;
- ❖ melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat; dan
- ❖ melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang
- ❖ Pemerintahan dan Pembangunan Manusia.

Sub Bidang Pemerintahan mempunyai tugas :

- ❖ menyiapkan bahan penyusunan rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) dan rencana perangkat daerah (Renstra dan Renja) lingkup Sub Bidang Pemerintahan;
- ❖ menyiapkan bahan pengendalian dan evaluasi terhadap pembangunan daerah dan perangkat daerah lingkup Sub Bidang Pemerintahan;
- ❖ menyiapkan bahan pengelolaan data dan informasi pembangunan sektoral sebagai bahan penyusunan rencana, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah lingkup Sub Bidang Pemerintahan;
- ❖ menyiapkan bahan integrasi, harmonisasi dan sinergitas kegiatan perangkat daerah kabupaten, provinsi, kementerian/lembaga, unsur masyarakat, akademisi, swasta dan desa lingkup Sub Bidang Pemerintahan;
- ❖ menyiapkan bahan pembinaan teknis perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah serta pengelolaan data dan informasi kepada perangkat daerah lingkup Sub Bidang Pemerintahan;
- ❖ melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan Sub Bidang Pemerintahan; dan
- ❖ melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia.

Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan

- a. Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan penyusunan bahan perencanaan, laporan hasil pengendalian dan evaluasi serta pengelolaan data dan informasi lingkup Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan;
- b. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana pada ayat (1), Bidang Perekonomian,



Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan mempunyai fungsi:

- ❖ penyusunan rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) dan rencana perangkat daerah (Renstra dan Renja) lingkup Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan;
- ❖ pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah dan perangkat daerah lingkup Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan;
- ❖ pengelolaan data dan informasi pembangunan sektoral sebagai bahan penyusunan rencana, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah lingkup Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan;
- ❖ merencanakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan perencanaan pembangunan daerah;
- ❖ pengintegrasian, harmonisasi dan sinergitas kegiatan Perangkat Daerah, provinsi, kementerian/lembaga, unsur masyarakat, akademisi dan swasta lingkup Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan;
- ❖ pembinaan teknis perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah serta pengelolaan data dan informasi kepada perangkat daerah lingkup Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan;
- ❖ pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan; dan
- ❖ pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Sub Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam mempunyai tugas :

- ❖ menyiapkan bahan penyusunan rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) dan rencana perangkat daerah (Renstra dan Renja) lingkup Sub Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
- ❖ menyiapkan bahan pengendalian dan evaluasi terhadap pembangunan daerah dan perangkat daerah lingkup Sub Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
- ❖ menyiapkan bahan pengelolaan data dan informasi pembangunan sektoral sebagai bahan penyusunan rencana, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah lingkup Sub Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
- ❖ menyiapkan bahan integrasi, harmonisasi dan sinergitas kegiatan perangkat daerah, provinsi, kementerian/lembaga, unsur masyarakat, akademisi dan swasta lingkup Sub Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
- ❖ menyiapkan bahan pembinaan teknis perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah serta pengelolaan data dan informasi kepada perangkat daerah lingkup Sub Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
- ❖ melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan Sub Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam; dan
- ❖ melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan.



Sub Bidang Permukiman dan Perumahan mempunyai tugas :

- ❖ menyiapkan bahan penyusunan rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) dan rencana perangkat daerah (Renstra dan Renja) lingkup Sub Bidang Perumahan dan Permukiman;
- ❖ menyiapkan bahan pengendalian dan evaluasi terhadap pembangunan daerah dan perangkat daerah lingkup Sub Bidang Perumahan dan Permukiman;
- ❖ menyiapkan bahan pengelolaan data dan informasi pembangunan sektoral sebagai bahan penyusunan rencana, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah lingkup Sub Bidang Perumahan dan Permukiman;
- ❖ menyiapkan bahan integrasi, harmonisasi dan sinergitas kegiatan perangkat daerah, provinsi, kementerian/lembaga, unsur masyarakat, akademisi dan swasta lingkup Sub Bidang Perumahan dan Permukiman;
- ❖ menyiapkan bahan pembinaan teknis perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah serta pengelolaan data dan informasi kepada perangkat daerah lingkup Sub Bidang Perumahan dan Permukiman;
- ❖ melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan Sub Bidang Perumahan dan Permukiman; dan
- ❖ melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan.

Sub Bidang Prasarana Wilayah mempunyai tugas :

- ❖ menyiapkan bahan penyusunan rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) dan rencana perangkat daerah (Renstra dan Renja) lingkup Sub Prasarana Wilayah;
- ❖ menyiapkan bahan pengendalian dan evaluasi terhadap pembangunan daerah dan perangkat daerah lingkup Sub Bidang Prasarana Wilayah;
- ❖ menyiapkan bahan pengelolaan data dan informasi pembangunan sektoral sebagai bahan penyusunan rencana, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah lingkup Sub Bidang Prasarana Wilayah;
- ❖ menyiapkan bahan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan perencanaan pembangunan daerah
- ❖ menyiapkan bahan integrasi, harmonisasi dan sinergitas kegiatan perangkat daerah, provinsi, kementerian/lembaga, unsur masyarakat, akademisi dan swasta lingkup Sub Bidang Prasarana Wilayah;
- ❖ menyiapkan bahan pembinaan teknis perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah serta pengelolaan data dan informasi kepada perangkat daerah lingkup Sub Bidang Prasarana Wilayah;
- ❖ melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan Sub Bidang Prasarana Wilayah; dan
- ❖ melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan.



Bidang Penelitian dan Pengembangan

- a. Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan penelitian, pengembangan dan inovasi daerah;
- b. Dalam hal melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai fungsi:
 - ❖ penyusunan bahan kebijakan teknis dan program penelitian dan pengembangan serta fasilitasi penerapan inovasi dan teknologi;
 - ❖ pelaksanaan penelitian dan pengembangan serta fasilitasi penerapan inovasi dan teknologi;
 - ❖ pelaksanaan pengkajian kebijakan Pemerintah Kabupaten;
 - ❖ pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan serta fasilitasi penerapan inovasi dan teknologi;
 - ❖ pelaksanaan kerjasama, koordinasi dan sinkronisasi penelitian dan pengembangan serta fasilitasi penerapan inovasi dan teknologi;
 - ❖ penyebarluasan informasi hasil penelitian dan pengembangan serta inovasi dan teknologi;
 - ❖ pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan Bidang Penelitian dan Pengembangan; dan
 - ❖ pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Sub Bidang Penelitian Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya mempunyai tugas :

- ❖ menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis dan program penelitian dan pengembangan bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya;
- ❖ menyiapkan bahan penelitian dan pengembangan bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya;
- ❖ menyiapkan bahan pengkajian kebijakan Pemerintah Daerah bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya;
- ❖ menyiapkan bahan penyusunan pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya;
- ❖ menyiapkan bahan kerjasama, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya;
- ❖ menyebarluaskan informasi hasil penelitian dan pengembangan serta inovasi dan teknologi penelitian bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya;
- ❖ melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan Sub Bidang Penelitian Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya; dan
- ❖ melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan.

Sub Bidang Penelitian Bidang Ekonomi dan Pembangunan mempunyai tugas :

- ❖ menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis dan program penelitian dan pengembangan bidang Ekonomi dan Pembangunan;
- ❖ menyiapkan bahan penelitian dan pengembangan bidang Ekonomi dan Pembangunan;
- ❖ menyiapkan bahan pengkajian kebijakan Pemerintah Kabupaten bidang Ekonomi dan Pembangunan;
- ❖ menyiapkan bahan penyusunan pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian



dan pengembangan bidang Ekonomi dan Pembangunan;

- ❖ menyiapkan bahan kerjasama, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan bidang Ekonomi dan Pembangunan;
- ❖ penyebarluasan informasi hasil penelitian dan pengembangan serta inovasi dan teknologi penelitian bidang Ekonomi dan Pembangunan;
- ❖ pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan Sub Bidang Penelitian Bidang Ekonomi dan Pembangunan; dan
- ❖ melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan.

Sub Bidang pengembangan Inovasi dan Teknologi mempunyai tugas :

- ❖ menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis dan program fasilitasi penerapan pengembangan inovasi dan teknologi;
- ❖ menyiapkan bahan fasilitasi penerapan inovasi dan teknologi lingkup Sub Bidang Pengembangan Inovasi dan Teknologi;
- ❖ menyiapkan bahan rancangan kebijakan terkait jenis, prosedur dan metode penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersifat inovatif;
- ❖ menyiapkan bahan perumusan pengendalian, evaluasi dan pelaporan atas fasilitasi penerapan inovasi dan teknologi;
- ❖ menyiapkan bahan kerjasama, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan fasilitasi penerapan inovasi dan teknologi;
- ❖ menyebarkan informasi hasil penelitian dan pengembangan serta inovasi dan teknologi pengembangan inovasi dan teknologi;
- ❖ pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan Sub Bidang Pengembangan Inovasi dan Teknologi; dan
- ❖ melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan.



D. ISU STRATEGIS BAPPELITBANGDA KABUPATEN SAMPANG

Hasil analisa isu strategis Bappelitbangda Kabupaten Sampang seperti yang tertuang didalam dokumen Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2020-2024 yang membutuhkan pemecahan dan penanganan segera di lingkup Bappelitbangda Kabupaten Sampang diantaranya :

- a. Peningkatan pengendalian dan evaluasi atas target-target kinerja yang tertuang dalam dokumen perencanaan;
- b. Peningkatan koordinasi perencanaan dan pengendalian di masing-masing lingkup Bidang Bappelitbangda;
- c. Peningkatan jumlah dan kapasitas SDM Bappelitbangda dalam melaksanakan tugas dan fungsinya;
- d. Peningkatan kualitas penelitian dan pengembangan.

e. CASCADING BAPPELITBANGDA KABUPATEN SAMPANG

Berdasarkan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah selanjutnya dijabarkan kedalam Cascading yang merupakan dokumen pernyataan proses penjabaran, penyelarasan dan penurunan kinerja secara bertahap secara vertikal dari level yang lebih tinggi ke level yang lebih rendah untuk mewujudkan target yg ingin dicapai dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yg telah ditetapkan dalam Renstra dan dijadikan acuan dalam penyusunan perjanjian kinerja



BAPPELITBANGDA KABUPATEN SAMPANG

**Tabel 1.1****Cascading Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah**

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Tujuan Renstra Perangkat Daerah Mengacu pada :		-							
	https://bit.ly/sasaranRanwalprpjmdd_spg21		-							
	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan Pembangunan yang berkualitas	Meningkatnya kualitas perencanaan dan pengendalian program	Persentase Perangkat Daerah dengan Kualitas Dokumen Perencanaan Baik	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi	Persentase dokumen perencanaan pembangunan yang ditetapkan dengan Perda/Perkada	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase Dok. Perencanaan Yang Tersusun	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Laporan Forum Konsultasi Publik yang disusun
				Persentase Capaian Indikator Kinerja Sasaran RENSTRA \geq 80%		Persentase usulan kegiatan yang disepakati dalam musrenbang dan pokok - pokok pikiran DPRD yang dijabarkan ke dalam RKPD			Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Jumlah Laporan Forum SKPD/Lintas SKPD yang disusun

**BAPPELITBANGDA KABUPATEN SAMPANG**

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						Persentase program/kegiatan Renja Perangkat Daerah yang konsisten dan selaras dengan Renstra Perangkat Daerah			Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota yang disusun
						Persentase program/kegiatan dalam Renja PD yang konsisten dan selaras dengan RKPD			Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Jumlah Laporan Bahan Musrenbang Kecamatan yang disusun
									Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan DBHCHT yang disusun
										Jumlah Perubahan Renja Tahun n-1 yang ditetapkan dengan SK Bupati
										Jumlah Perubahan RKPD Tahun n-1 yang ditetapkan

**BAPPELITBANGDA KABUPATEN SAMPANG**

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										dengan Perbup
										Jumlah Renja Tahun n yang ditetapkan dengan Perbup
										Jumlah Renstra yang ditetapkan dengan Perbup
										Jumlah RKPD Tahun n yang ditetapkan dengan Perbup
										Jumlah RPJMD yang ditetapkan dengan Perda
							Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Updating Data SKPD Kab. Sampang	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah SKPD yang melaksanakan updating data ...
									Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	Jumlah SKPD yang memanfaatkan SIPD dalam penyusunan dokumen perencanaan Perangkat Daerah



BAPPELITBANGDA KABUPATEN SAMPANG

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										Jumlah pelatihan pemanfaatan aplikasi SIPD yang dilaksanakan
									Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah profil daerah yang disusun
							Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Lapr Evaluasi Pembangunan Daerah	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah Yang Disusun
									Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan daerah
										Jumlah Laporan DAK Fisik yang disusun



BAPPELITBANGDA KABUPATEN SAMPANG

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										Jumlah laporan fasilitasi dana CSR yang disusun
					Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Yang Berkualitas lingkup bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Yang difasilitasi	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jumlah Dok PD Yang Berkualitas Bidang Pembangunan Manusia	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah laporan hasil Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang disusun
									Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah laporan hasil fasilitasi/asistensi Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan yang disusun
									Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Jumlah laporan hasil monitoring dan evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan



BAPPELITBANGDA KABUPATEN SAMPANG

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
									Bidang Pemerintahan	yang disusun
									Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia dan Kesejahteraan Rakyat (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah laporan hasil Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia dan Kesejahteraan Rakyat yang disusun
									Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah laporan hasil fasilitasi/asistensi Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia dan Kesejahteraan Rakyat yang disusun

**BAPPELITBANGDA KABUPATEN SAMPANG**

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
									Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah laporan hasil monitoring dan evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia dan Kesejahteraan Rakyat yang disusun
									Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah laporan Koordinasi pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia dan Kesejahteraan Rakyat yang disusun



BAPPELITBANGDA KABUPATEN SAMPANG

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						Persentase dokumen rencana Perangkat Daerah lingkup bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan yang difasilitasi	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Jumlah Dok PD Yang Berkualitas Bidang Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
									Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian
									Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Dokumen hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian

**BAPPELITBANGDA KABUPATEN SAMPANG**

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
									Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Dokumen hasil Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian
									Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
									Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA



BAPPELITBANGDA KABUPATEN SAMPANG

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
									Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Dokumen hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA
									Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Dokumen hasil Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA
							Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah Dok PD Yang Berkualitas Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)

**BAPPELITBANGDA KABUPATEN SAMPANG**

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
									Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur
									Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Dokumen hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur
									Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Dokumen hasil Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur

**BAPPELITBANGDA KABUPATEN SAMPANG**

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
									Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
									Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan
									Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Dokumen hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan



BAPPELITBANGDA KABUPATEN SAMPANG

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
									Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Dokumen hasil Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan
	Meningkatnya kualitas inovasi daerah	Indeks Inovasi Daerah	Meningkatnya kualitas inovasi Daerah	Persentase Inovasi Daerah yang tervalidasi	Program Penelitian dan Pengembangan	Persentase Inovasi dan Teknologi yang di implemtasikan	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Persentase hasil Kelitbangan Bidang Pemerintahan yang direkomendasikan sebagai bahan masukan kebijakan	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah
									Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Jumlah Dokumen Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum



BAPPELITBANGDA KABUPATEN SAMPANG

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
									Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Jumlah Dokumen Penelitian dan Pengembangan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan
									Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi
									Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi



BAPPELITBANGDA KABUPATEN SAMPANG

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
									Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketertiban dan Ketentraman Umum dan Perlindungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketertiban dan Ketentraman Umum dan Perlindungan Masyarakat
									Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penataan Kelembagaan Desa	Jumlah Dokumen Penelitian dan Pengembangan Bidang Penataan Kelembagaan Desa
									Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketatalaksanaan Desa	Jumlah Dokumen Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketatalaksanaan Desa



BAPPELITBANGDA KABUPATEN SAMPANG

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
									Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur Desa	Jumlah Dokumen Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur Desa
									Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Desa	Jumlah Dokumen Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Desa
									Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Badan Usaha Milik Desa	Jumlah Dokumen Penelitian dan Pengembangan Bidang Badan Usaha Milik Desa
									Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan



BAPPELITBANGDA KABUPATEN SAMPANG

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
									Perumusan Rekomendasi Atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi terhadap Pelaksanaan Peraturan	Dokumen Perumusan Rekomendasi Atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi terhadap Pelaksanaan Peraturan
									Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan
						Persentase hasil litbang yang di implementasikan	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Persentase hasil Kelitbang Bidang Sosial dan Kependudukan yang direkomendasikan sebagai bahan masukan kebijakan	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	Jumlah Dokumen Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial

**BAPPELITBANGDA KABUPATEN SAMPANG**

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
									Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Jumlah Dokumen Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
									Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Jumlah Dokumen Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan
									Penelitian dan Pengembangan Kepemudaan dan Olahraga	Jumlah Dokumen Penelitian dan Pengembangan Kepemudaan dan Olahraga
									Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Jumlah Dokumen Penelitian dan Pengembangan Pariwisata
									Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	Jumlah Dokumen Penelitian dan Pengembangan Kesehatan



BAPPELITBANGDA KABUPATEN SAMPANG

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
									Penelitian dan Pengembangan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Jumlah Dokumen Penelitian dan Pengembangan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
									Penelitian dan Pengembangan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah Dokumen Penelitian dan Pengembangan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
									Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja
									Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	Jumlah Dokumen Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat
									Penelitian dan Pengembangan Transmigrasi	Jumlah Dokumen Penelitian dan Pengembangan Transmigrasi



BAPPELITBANGDA KABUPATEN SAMPANG

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Persentase hasil Kelitbangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan yang direkomendasikan sebagai bahan masukan kebijakan	Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Jumlah Dokumen Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
									Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Dokumen Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan
									Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah	Jumlah Dokumen Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah
									Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Jumlah Dokumen Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan



BAPPELITBANGDA KABUPATEN SAMPANG

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
									Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	Jumlah Dokumen Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan
									Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumberdaya Mineral	Jumlah Dokumen Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumberdaya Mineral
									Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup
									Penelitian dan Pengembangan Kehutanan	Jumlah Dokumen Penelitian dan Pengembangan Kehutanan
									Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	Jumlah Dokumen Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum

**BAPPELITBANGDA KABUPATEN SAMPANG**

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
									Penelitian dan Pengembangan Perhubungan	Jumlah Dokumen Penelitian dan Pengembangan Perhubungan
									Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Jumlah Dokumen Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman
									Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan	Jumlah Dokumen Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan
									Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika	Jumlah Dokumen Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika
							Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Persentase Inovasi dan Teknologi yang diterapkan	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi	Jumlah Inovasi dan Teknologi yang diterapkan



BAPPELITBANGDA KABUPATEN SAMPANG

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
									dan Penerapan Teknologi	
									Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah Sosialisasi dan Fasilitasi Kelitbangan
					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Meningkatnya Pelayanan Pemerintah Daerah	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Lapr Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Yang Tersusun Tepat Waktu	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dok. Perencanaan PD (Renstra, Renja, SPIP)
									Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dok. RKA-SKPD
									Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dok. Perubahan RKA-SKPD
									Koordinasi dan Penyusunan	Jumlah Dok DPA-SKPD



BAPPELITBANGDA KABUPATEN SAMPANG

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
									DPA-SKPD	
									Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dok. DPPA-SKPD
									Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dok. Evaluasi PD (LPPD, LKPJ, SAKIP, LKjIP, RB)
							Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penyusunan laporan keuangan yang baik dan tepat waktu	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pegawai ASN
									Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dok. Verifikasi Keuangan
									Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Lapr. Keuangan Akhir Tahun SKPD



BAPPELITBANGDA KABUPATEN SAMPANG

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
									Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Lapr. Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
							Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN yang mengikuti bimtek implementasi perundang-undangan
							Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Listrik yang disediakan
									Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan
									Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor
									Penyediaan Barang Cetak dan	Jumlah barang cetakan yang disediakan

**BAPPELITBANGDA KABUPATEN SAMPANG**

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
									Penggandaan	Jumlah belanja penggandaan yang disediakan
									Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan yang disediakan
									Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Pemenuhan Makanan dan Minuman Kunjungan Tamu
									Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Pemenuhan Makanan dan Minuman Rapat
								Jumlah Rapat koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah		
										Jumlah Rapat koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah
							Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas R4 yang disediakan



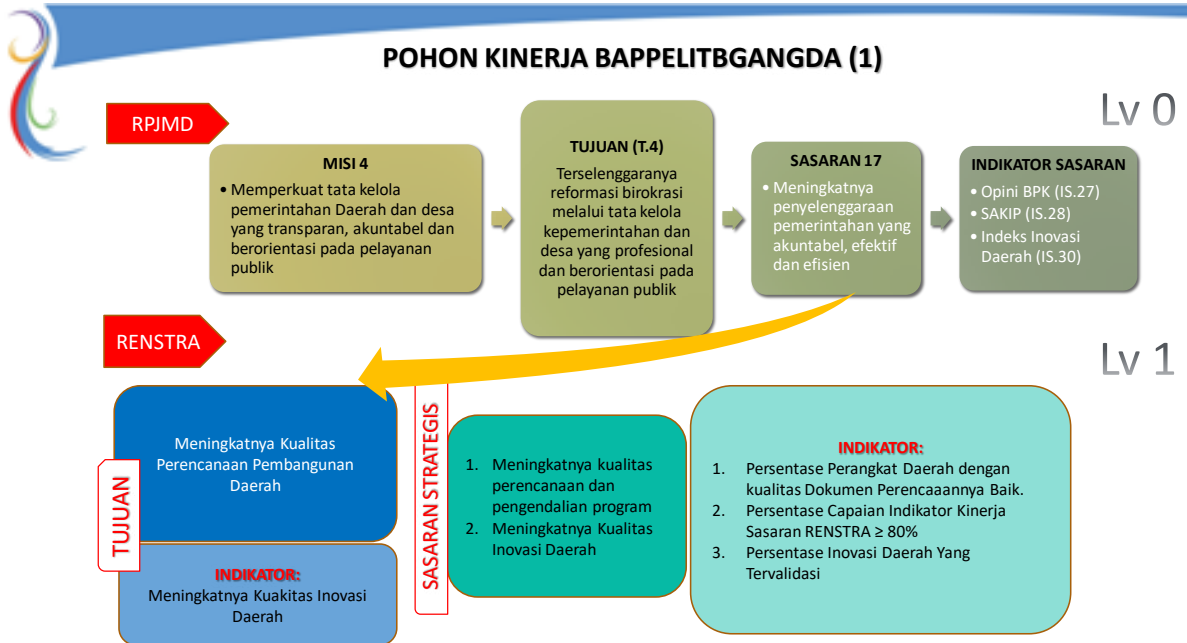
BAPPELITBANGDA KABUPATEN SAMPANG

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							Daerah			
										Jumlah pengadaan kendaraan dinas R2
									Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pengadaan peralatan dan mesin lainnya
							Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang terkirim
									Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Cakupan pemenuhan kebutuhan listrik, air, dan komunikasi
									Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Cakupan penyediaan jasa pelayanan umum kantor
										Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan



BAPPELITBANGDA KABUPATEN SAMPANG

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										Umum Kantor
							Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Yang dipelihara	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang dipelihara
										Jumlah Kendaraan Dinas yang mendapatkan perizinan kendaraan
									Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yg dipelihara
									Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara
										Jumlah Rehabilitasi Kantor
							Kegiatan Penataan Organisasi	-	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah dokumen SKM
										Jumlah Promosi pelayanan Publik Perangkat Daerah





BAPPELITBANGDA KABUPATEN SAMPANG



BAPPELITBANGDA KABUPATEN SAMPANG

Strategic Objectives	Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah IK: Indeks Inovasi Daerah		Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah IK : (1) Nilai Perencanaan Kinerja Daerah (2) Nilai Pengukuran Kinerja Daerah									
	Meningkatnya Inovasi Pelayanan Publik IK : Persentase OPD dengan Indeks Inovasi OPD Kategori Inovatif atau Lebih	Meningkatnya Kualitas Penelitian/Kajian dalam mendukung Perumusan Kebijakan Daerah IK : Persentase Peningkatan Penelitian/Kajian Yang Menjadi Dasar Perumusan Kebijakan	Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Pengendalian Daerah IK : (1) Persentase PD dengan Kualitas Dokumen Perencanaan Baik (2) Persentase Capaian Indikator Kinerja Sasaran Renstra >= 80 %									
Tactical Objectives	Implementasi Inovasi IK : Persentase Inovasi Yang Terimplementasikan	Implementasi Penelitian/Kajian IK : Persentase Penelitian/Kajian Yang diindaklanjuti	Tercapainya Sinergitas Perencanaan Pembangunan Daerah IK : Persentase Dokumen Perencanaan Pembangunan daerah yang sesuai dan Berurutanitas Fasal					Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah IK : Persentase Dokumen Perencanaan Yang Berkualitas			Meningkatnya Pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah IK : Persentase Dokumen Pengendalian Yang Dibangun Tepat Waktu	
Operational Objectives	Terlaksananya Pengembangan Inovasi dan Teknologi IK : Jumlah Inovasi dan Teknologi Yang Dikembangkan	Penyusunan Penelitian/Kajian sesuai Jarkes Daerah IK : Proposal penelitian, TmH dan KAK	Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia IK : Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang PPM	Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Perencanaan dan SDG IK : Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi dan SDG	Terlaksananya Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Kewilayahan IK : Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang Ekspasurw	Terlaksananya Penyusunan Perencanaan Pembangunan jangka Panjang Daerah IK : Jumlah Dokumen RPJP	Terlaksananya Penyusunan Perencanaan Pembangunan jangka Menengah Daerah IK : Jumlah Dokumen RPJMD	Terlaksananya Penyusunan Perencanaan Pembangunan jangka Pendek Daerah IK : Jumlah Dokumen RPPD	Tersedianya Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Yang Berkualitas IK : Jumlah Data Perencanaan Pembangunan Yang Tersedia	Terlaksananya Pengendalian dan evaluasi Pembangunan jangka Panjang Daerah IK : Laporan pembangunan jangka Panjang Daerah	Terlaksananya Pengendalian dan evaluasi Pembangunan jangka Menengah Daerah IK : Laporan Pembangunan jangka Menengah Daerah	Terlaksananya Pengendalian dan evaluasi Pembangunan Tahunan Daerah IK : Laporan, Laporan DAJ, Laporan Kinerja
Process	Uji Coba Rancangan Bangun Inovasi IK : Dokumen Rancang Bangun	Pelaksanaan Laporan Akhir IK : Laporan, Antara Laporan Akhir	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan bersama Stakeholder Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia IK : Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan	Koordinasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan bersama Stakeholder Bidang Perencanaan dan SDG IK : Rancangan dokumen Perencanaan Pembangunan	Koordinasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan bersama Stakeholder Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan IK : Rancangan dokumen Perencanaan Pembangunan	Penetapan Dok RPJP IK : Dok RPJP Tepat Waktu	Penetapan Dok RPJMD IK : Dok RPJMD Tepat Waktu	Penetapan Dok Perencanaan Tahunan IK : Dokumen RPPD Tepat Waktu	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah IK : Jumlah Dokumen Profil Pembangunan Daerah	Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan jangka Panjang Daerah IK : Laporan, Evaluasi	Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan jangka Menengah Daerah IK : Laporan, Evaluasi	Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Tahunan Daerah IK : Laporan, Evaluasi
	Sosialisasi Penegembangan Inovasi IK : Laporan Sosialisasi Inovasi	Forum diskusi Laporan Awal IK : Laporan Awal penelitian	Forum Diskusi Pemangku Kepentingan Pembangunan Daerah IK : Laporan Forum Diskusi	Forum Diskusi Pemangku Kepentingan Pembangunan Daerah IK : Laporan Forum Diskusi	Forum Diskusi Pemangku Kepentingan Pembangunan Daerah IK : Laporan Forum Diskusi	Penyusunan Rancangan Dokumen Perencanaan jangka Panjang IK : Rancangan Dok RPJP	Penyusunan Rancangan Dokumen Perencanaan jangka Menengah IK : Rancangan Dok RPJMD	Penyusunan Rancangan Dokumen Perencanaan Tahunan IK : Rancangan Dok RPPD	Pengumpulan dan analisis data/informasi perencanaan pembangunan yang dibutuhkan IK : Jumlah Data/informasi Yang Dibutuhkan	Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan jangka Panjang Daerah IK : Laporan Pengendalian jangka Panjang Daerah	Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan jangka Menengah Daerah IK : Laporan, Pelaksanaan Koordinasi	Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan Tahunan Daerah IK : Laporan Pelaksanaan Koordinasi
	Pengumpulan data dan analisa data IK : Laporan Awal Penelitian		Pendampingan PD dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang PPM IK : Laporan, Asistensi Penyusunan Dok Perencanaan	Pendampingan PD dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Perencanaan dan SDG IK : Laporan, Asistensi Penyusunan Dok Perencanaan	Pendampingan PD dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan IK : Laporan, Asistensi Penyusunan Dok Perencanaan	Musyawarah Perencanaan Pembangunan jangka Panjang IK : Berita Acara Musyawarah RPJP	Musyawarah Perencanaan Pembangunan jangka Menengah IK : Berita Acara Musyawarah RPJMD	Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tahunan IK : Berita Acara Musyawarah RPPD	Sosialisasi dan Pembinaan Pemantauan Data dan Informasi Pembangunan Daerah IK : Jumlah Berita dan Sosialisasi			
	Forum Diskusi Usulan Penelitian/Kajian IK : Jumlah Usulan Penelitian/Kajian		Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Perangkat Daerah IK : Laporan, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Perangkat Daerah IK : Laporan, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Perangkat Daerah IK : Laporan, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan	Konsultasi Publik dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan jangka Panjang IK : Berita Acara Konsultasi Publik	Konsultasi Publik dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan jangka Menengah IK : Berita Acara Konsultasi Publik	Konsultasi Publik dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Tahunan IK : Berita Acara Konsultasi Publik				
	Koordinasi dengan OPD dan Stakeholder Terkait IK : Laporan, Hasil Koordinasi					Penelaahan dan Sinkronisasi Dokumen RPJP dengan Dokumen Kebijakan Lainnya IK : Jumlah Dokumen Perencanaan jangka Panjang Yang Ditelaah	Penelaahan dan Sinkronisasi Dokumen RPJMD dengan Dokumen Kebijakan Lainnya IK : Jumlah Dokumen Perencanaan jangka Menengah Yang Ditelaah	Peninjauan Usulan Pembangunan Dari Masyarakat IK : Jumlah Usulan Masyarakat Yang Ditelaah				
												Penelaahan dan Sinkronisasi Dokumen RPPD dengan Dokumen Kebijakan Lainnya IK : Jumlah Dokumen Perencanaan Tahunan Yang Ditelaah



f. ASPEK STRATEGIS DAN PERMASALAHAN PERANGKAT DAERAH

Perencanaan pembangunan antara lain dimaksudkan agar layanan Perangkat Daerah senantiasa mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan dan aspirasi pengguna layanan. Oleh karena itu perhatian kepada mandat dari masyarakat dan lingkungan eksternalnya merupakan perencanaan dari luar ke dalam yang tidak boleh diabaikan.

Permasalahan pelayanan Perangkat Daerah merupakan penyebab terjadinya kesenjangan antara kinerja pelayanan yang dicapai saat ini dengan yang di rencanakan serta antara apa yang ingin di capai di masa datang dengan konsisi riil saat perencanaan dibuat. Suatu permasalahan pelayanan Perangkat Daerah dianggap memiliki nilai prioritas untuk dikerjakan apabila berhubungan dengan pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, khususnya untuk mendukung pencapaian tujuan-tujuan pembangunan.

Dari rumusan permasalahan yang telah diidentifikasi berdasarkan data kesenjangan (*gap*) antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang di rencanakan, kemudian rumusan permasalahan tersebut dipetakan menjadi masalah pokok, masalah dan akar masalah. Seperti pada tabel berikut ini

Tabel 1.2
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran
Perangkat Daerah

No.	Masalah	Pokok Masalah	Akar Masalah
1.	Persentase dokumen perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas sudah tercapai 100% namun dalam mempertahankan kualitas capaian tersebut terdapat beberapa kendala	Fungsi koordinasi perencanaan masih kurang optimal	Faktor Internal: Keterbatasan SDM pada Bappelitbangda dalam melaksanakan fungsi koordinasi perencanaan Faktor Eksternal: Kurangnya dukungan Perangkat Daerah dalam rangka mewujudkan dokumen perencanaan pembangunan yang berkualitas
2.	Belum tercapainya target pada indikator kinerja	Dari 36 indikator sasaran yang tertuang pada Perubahan	Faktor Internal:



BAPPELITBANGDA KABUPATEN SAMPANG

No.	Masalah	Pokok Masalah	Akar Masalah
	"Persentase capaian indikator kinerja sasaran dalam RPJMD $\geq 80\%$ " secara sempurna	RPJMD Kabupaten Sampang Tahun 2019-2020 terdapat 7 indikator yang nilai capaiannya $\geq 80\%$, sehingga nilai realisasi indikator "Persentase capaian indikator kinerja sasaran dalam RPJMD $\geq 80\%$ " sebesar 80,55 persen dari target 95,00 persen. Sedangkan capaiannya memiliki nilai 84,79 persen.	Kurangnya koordinasi dan pengendalian di lingkup bidang Bappelitbangda dalam rangka mengawal capaian indikator sasaran RPJMD secara periodik hal ini bertujuan supaya Perangkat Daerah mampu mengevaluasi kinerjanya sehingga mampu mencapai target kinerja sebagaimana telah ditentukan sebelumnya. Faktor Esternal: Terdapat kendala teknis pada Perangkat Daerah masing-masing sehingga Perangkat Daerah pengampu indikator sasaran RPJMD tersebut tidak mampu mencapai target
3.	Persentase Perangkat Daerah dengan Kualitas Dokumen Perencanaan Baik sudah tercapai 100% namun dalam prosesnya mengalami beberapa kendala	Fungsi koordinasi perencanaan masih kurang optimal	Faktor Internal: Keterbatasan SDM pada Bappelitbangda dalam melaksanakan fungsi koordinasi perencanaan Faktor Eksternal: Kurangnya koordinasi Perangkat Daerah dalam penyusunan dokumen perencanaannya Kapasitas personel penyusun dokumen perencanaan Perangkat Daerah masih perlu ditingkatkan
4.	Persentase hasil kajian penelitian dan pengembangan yg dijadikan dasar pembangunan 100% namun dalam prosesnya mengalami beberapa kendala	Terdapat usulan kajian kelitbang Perangkat Daerah yang masih belum terakomodir	Faktor Internal: Keterbatasan SDM Bidang Litbang Faktor Eksternal: Masih terdapat usulan kajian



BAPPELITBANGDA KABUPATEN SAMPANG

No.	Masalah	Pokok Masalah	Akar Masalah
			dari Perangkat Daerah yang belum mengacu pada prioritas pembangunan
5	Kurang optimalnya pelaksanaan inovasi pada OPD	Kurang responnya PD terhadap pelaporan inovasi daerahnya	Faktor Internal: SDM pelaksana inovasi kurang serius terhadap pelaksanaan inovasi OPD masing--masing dan masih bekerja berdasarkan budaya kerja lama Faktor Eksternal: Marketing branding tidak ditindak lanjuti

Sumber : Renstra Bappelitbangda Kabupaten Sampang, 2019-2024

Dari identifikasi permasalahan pelayanan dapat dirumuskan isu-isu strategis sebagai berikut:

- Peningkatan pengendalian dan evaluasi atas target-target kinerja yang tertuang dalam dokumen perencanaan;
- Peningkatan koordinasi perencanaan dan pengendalian di masing-masing lingkup Bidang Bappelitbangda;
- Peningkatan jumlah dan kapasitas SDM Bappelitbangda dalam melaksanakan tugas dan fungsinya; dan
- Peningkatan kualitas penelitian dan pengembangan.

Beberapa isu strategis tersebut dapat ditelaah lebih dalam dan dikaitkan pada isu pengarusutamaan gender. Hal tersebut perlu dilakukan untuk melakukan analisa lebih lanjut terhadap program dan kegiatan perangkat daerah. Analisis gender adalah analisis untuk mengidentifikasi dan memahami pembagian kerja/peran laki-laki dan perempuan, akses kontrol terhadap sumber-sumber daya pembangunan, partisipasi dalam proses pembangunan dan manfaat yang mereka nikmati, pola hubungan antara laki-laki dan perempuan yang timpang yang di dalam pelaksanaannya memperhatikan faktor lainnya. Dalam analisa gender ini juga dilakukan proses identifikasi masalah terutama mengenai isu gender yaitu suatu kondisi yang menunjukkan kesenjangan laki-laki dan perempuan atau ketimpangan gender, yaitu kesenjangan antara kondisi



sebagaimana yang dicita-citakan dengan kondisi gender sebagaimana adanya.

g. PETA PROSES BISNIS BAPPELITBANGDA KABUPATEN SAMPANG

Dokumen Cascading selanjutnya dibandingkan dengan peta proses bisnis yang merupakan diagram yang menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi/level untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi agar menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan.

Penyusunan peta proses bisnis menjadi salah satu faktor suksesnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi di instansi pemerintah. Penyusunan peta proses bisnis merupakan bagian dari penataan tata laksana yang dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien dan terukur pada masing-masing instansi pemerintah.

Jika proses bisnis yang berbelit-belit dan tumpang-tindih antara satu unit organisasi dengan unit organisasi yang lain akan membuat organisasi menjadi lambat untuk bekerja. Oleh karena itu, setiap unit organisasi memerlukan peta proses bisnis yang mampu menggambarkan proses bisnis yang dilakukan oleh organisasi dalam mencapai visi, misi, dan tujuan Bappelitbangda Kabupaten Sampang.

Tujuan penyusunan peta proses bisnis adalah untuk menjadi dasar pengambilan keputusan strategis terkait pengembangan organisasi dan sumber daya manusia, serta penilaian kinerja. Peta proses bisnis bermanfaat untuk melihat potensi masalah yang ada di dalam pelaksanaan suatu proses sehingga solusi penyempurnaan proses lebih terarah, serta memiliki standar pelaksanaan pekerjaan sehingga memudahkan dalam mengendalikan dan mempertahankan kualitas pelaksanaan pekerjaan.

Berikut Peta Proses Bisnis Bappelitbangda Kabupaten Sampang :



BAPPELITBANGDA KABUPATEN SAMPANG



Tugas Pokok & Fungsi

PERATURAN BUPATI SAMPANG NO. 9 TAHUN 2020 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, TATA KERJA BAPPELITBANGDA KABUPATEN

TUGAS

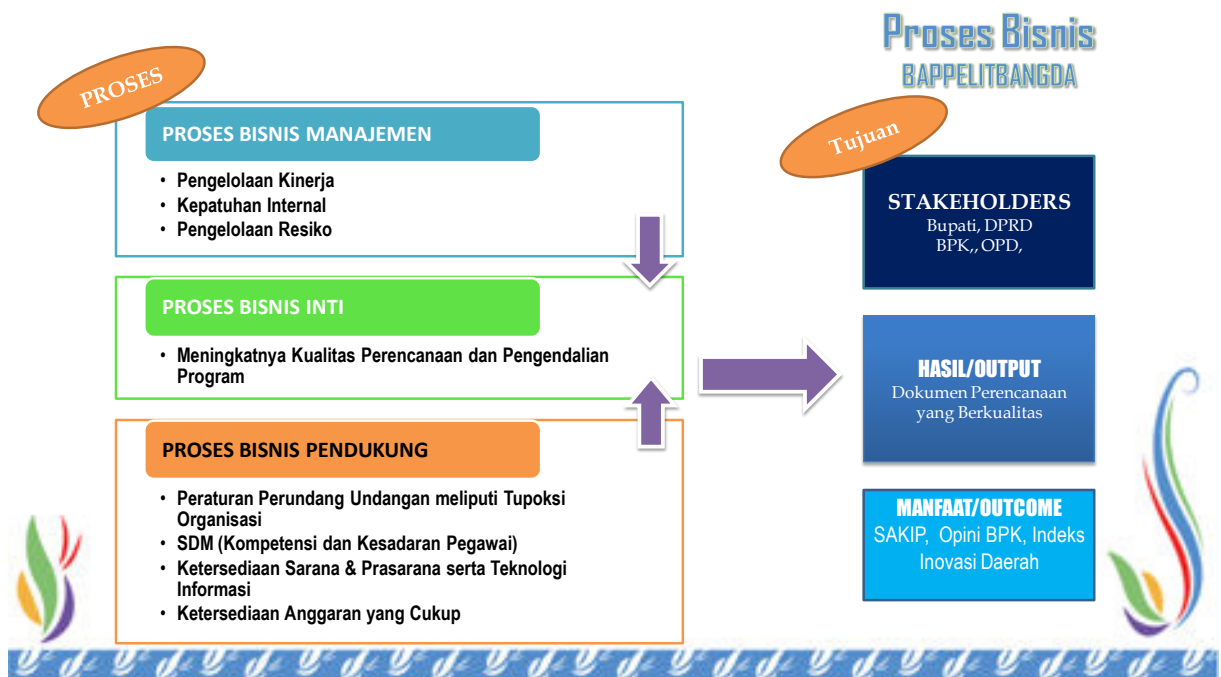
Membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan serta tugas pembantuan



BAPPELITBANGDA
KABUPATEN SAMPANG

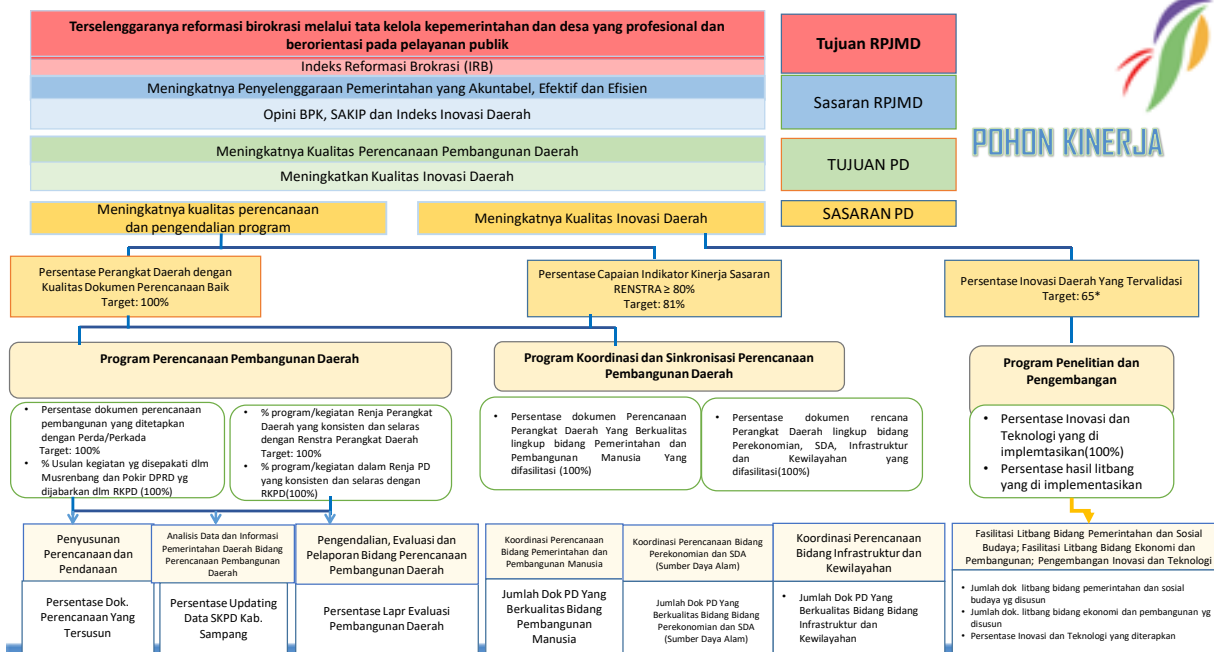
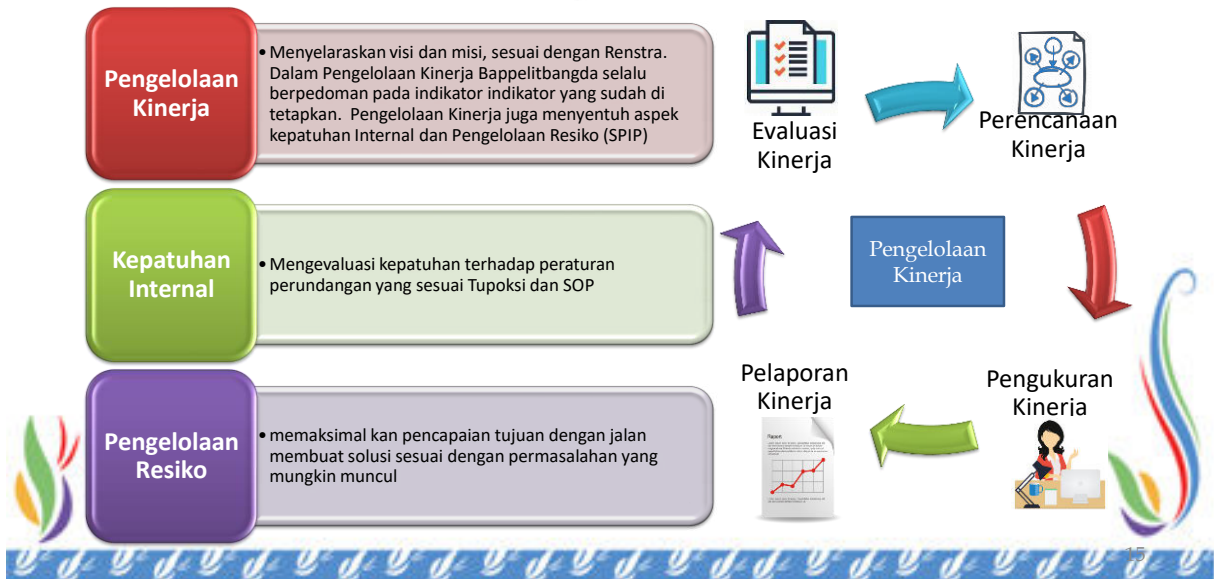
FUNGSI

- penyusunan kebijakan teknis bidang Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan;
- pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan;
- pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan;
- pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah bidang Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan; dan
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.



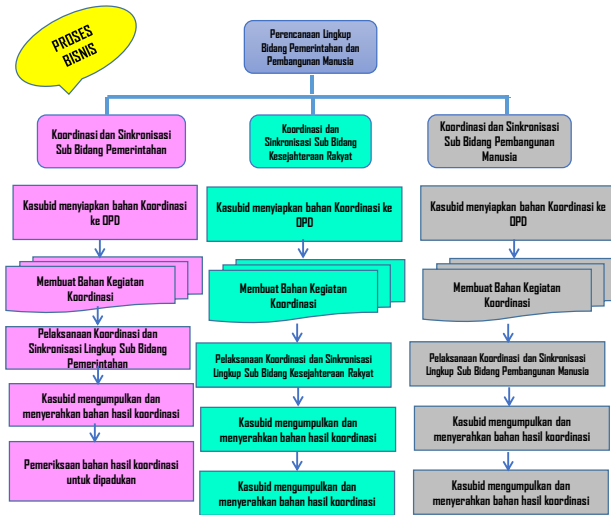


Proses Bisnis Manajemen

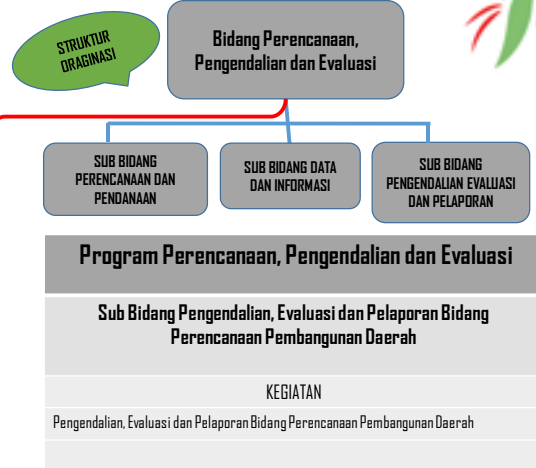
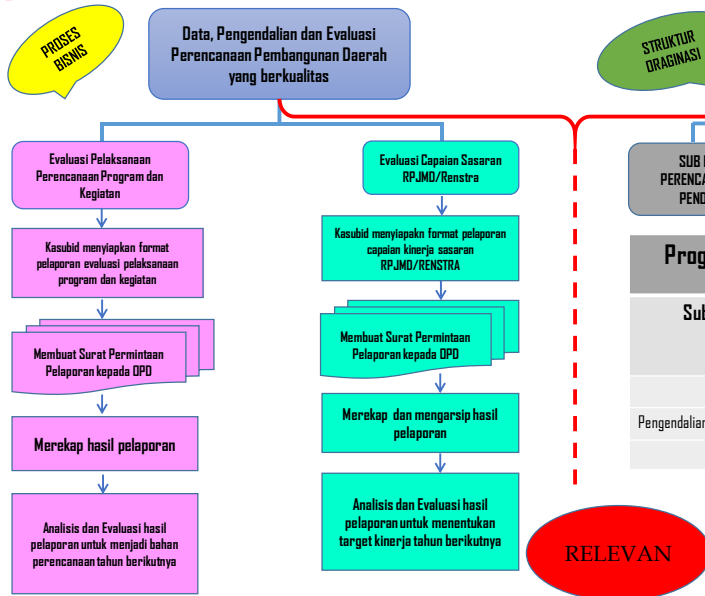




Perbandingan Proses Bisnis dan Struktur Organisasi



Lanjutan...





h. RINGKASAN LAPORAN HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA

Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2020 nomor : 065/450.4/434.100/2021 tanggal 30 September 2021, beberapa hal yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut :

A. Perencanaan Kinerja

Pada pemenuhan perencanaan strategis, kualitas Renstra hingga implementasi Renstra t telah memenuhi kriteria namun terdapat beberapa kondisi yang tidak memenuhi.

B. Pengukuran Kinerja

Pemenuhan Pengukuran Kinerja

Belum terdapat mekanisme pengumpulan data kinerja sehingga penyajian data pada laporan kinerja tidak dapat diyakini validitasnya dan keandalannya.

Kualitas Pengukuran

Pengukuran kinerja belum dikembangkan menggunakan teknologi informasi

Implementasi Kinerja

Target Kinerja *Persentase Perangkat Daerah Dengan Kualitas Dokumen Perencanaan Baik* belum berdasarkan basis data yang memadai karena hasil dari evaluasi SAKIP SKPD Tahun 2020 masih terdapat SKPD yang belum memenuhi kriteria kualitas dokumen perencanaan baik

Belum ada penjelasan kondisi eksisting jumlah perangkat daerah dengan kualitas dokumen perencanaan baik

Hasil pengukuran kinerja mulai dari setingkat edselon I keatas belum dikaitkan dengan (dimanaatkan sebagai dasar pemberian)reward dan punishment

C. Pelaporan Kinerja

Informasi kinerja belum sepenuhnya digunakan dalam pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja yakni dalam hal :

- Perbaikan perencanaan
- Untuk menilai dan memperbaiki pelaksanaan program dan kegiatan organisasi
- Untuk peningkatan kinerja
- Informasi yang disajikan telah digunakan untuk penilaian kinerja

D. Evaluasi Internal



BAPPELITBANGDA KABUPATEN SAMPANG

Berdasarkan temuan/hasil evaluasi yang telah dilaksanakan, terdapat kelemahan sehingga direkomendasikan agar dilakukan beberapa perbaikan oleh Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sampang sebagai berikut :

A. Perencanaan Kinerja

Identifikasi, analisa dan mengurangi output/komponen dan belanja yang tidak relevan dengan maksud kegiatan

B. Pengukuran Kinerja

Kualitas Pengukuran

Pengukuran kinerja ddikembangkan dengan menggunakan teknologi kinerja yang berkelanjutan dan dapat diukur secara maksimal

Implementasi Kinerja

Hasil pengukuran (capaian) kinerja mulai dari setingkat eselon IV ke atas harus dikaitkan dengan (dimanfaatkan sebagai dasar pemberian) reward and punishment

C. Pelaporan Kinerja

Dalam laporan kinerja menyajikan informasi sesuai standart dan informasi yang disajikan agar digunakan untuk peningkatan kinerja

D. Evaluasi Internal

E. Pencapaian Sasaran

Meningkatkan kinerja agar target output/outcome dapat dicapai.



BAB I

PENDAHULUAN

A. UMUM

Pembangunan Daerah merupakan salah satu sub sistem dari pembangunan nasional yang meliputi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang ditujukan untuk meningkatkan harkat, martabat dan memperkuat jati diri serta kepribadian masyarakat dalam pendekatan lokal, nasional dan global. Dalam perspektif perencanaan pembangunan, Pemerintah Daerah harus memperhatikan keseimbangan berbagai aspek dalam satu kesatuan wilayah pembangunan ekonomi, hukum, sosial, budaya, politik, pemerintahan dan lingkungan hidup

untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan, dengan diikuti oleh penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel (*Good Governance*).

Pemerintahan yang akuntabel merupakan kewajiban yang perlu dilaksanakan dalam usaha mewujudkan visi misi pembangunan daerah dan aspirasi serta cita-cita masyarakat dalam mencapai masa depan yang lebih baik. Berkaitan dengan hal itu, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan terukur, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna,



BAPPELITBANGDA KABUPATEN SAMPANG

serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Amanah Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara negara mulai dari pejabat eselon II ke bawah untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya yang dipercayakan padanya berdasarkan Rencana Strategis (RENSTRA) yang dirumuskan sebelumnya yaitu melalui penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman penyusunan penetapan kinerja dan pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, disebutkan bahwa laporan akuntabilitas kinerja adalah laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Laporan akuntabilitas kinerja berisi ikhtisar pencapaian sasaran yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dan dokumen perencanaan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Bappelitbangda

Kabupaten Sampang Tahun 2022, merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Bappelitbangda Kabupaten Sampang sebagai salah satu penyelenggara Pemerintahan Kabupaten Sampang dalam kerangka integrasi perwujudan Visi dan Misi Bappelitbangda Kabupaten Sampang. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini merupakan instrumen dan metode pertanggungjawaban pemerintah yang pada intinya mengungkapkan target perencanaan, pelaksanaan, dan pengukuran kinerja serta evaluasi dan analisa atas capaian kinerja hasil pelaksanaan tahun sebelumnya. LKjIP menjelaskan faktor-faktor keberhasilan atau kegagalan atas capaian realisasi target kinerja Bappelitbangda Kabupaten Sampang melalui pengelolaan sumber daya yang berbasis kinerja sebagai bagian dari pemenuhan kewajiban yang bersifat transparansi dan akuntabilitas.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini disusun dengan maksud menginformasi pertanggungjawaban Bappelitbangda Kabupaten Sampang secara akuntabel dalam pelaksanaan tugas dan fungsi serta perannya dalam penggunaan anggaran dan kebijakan yang diamanatkan kepada instansi



BAPPELITBANGDA KABUPATEN SAMPANG

pemerintah berdasarkan perencanaan strategis yang ditetapkan.

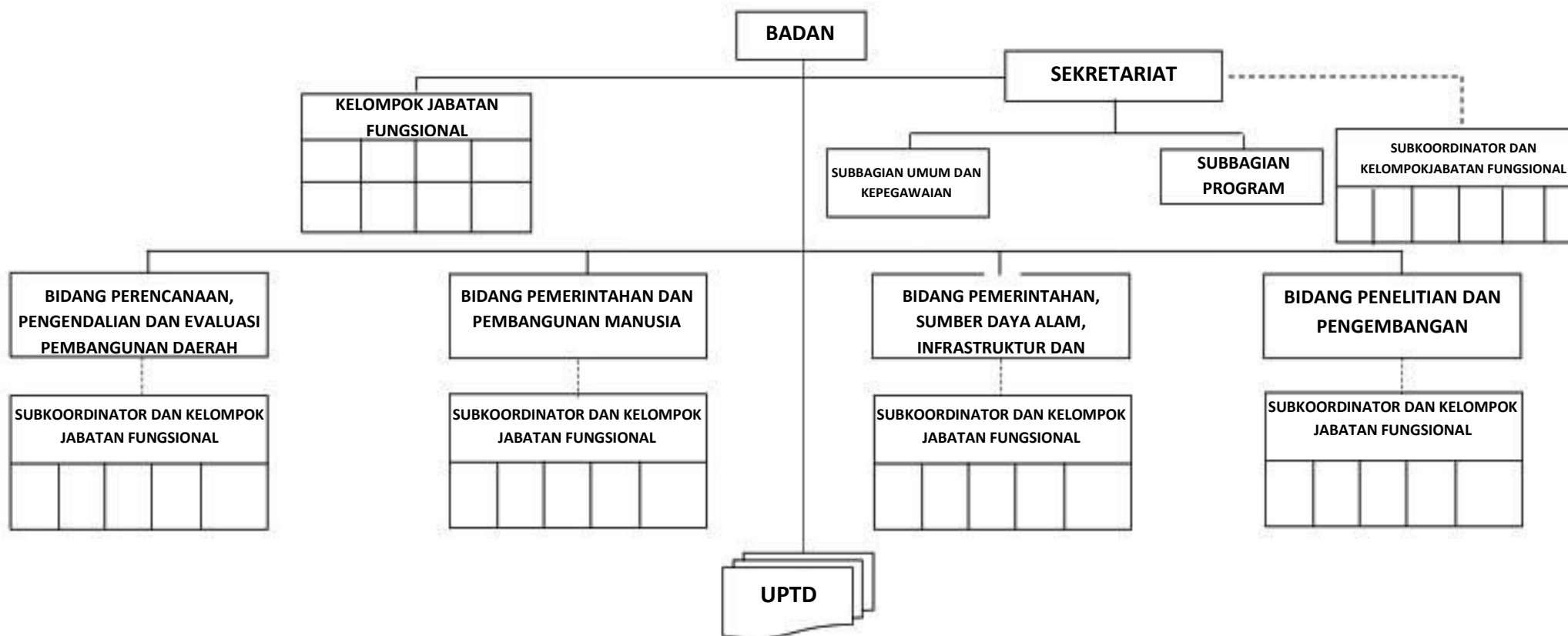
Adapun tujuannya adalah Memberikan informasi mengenai kinerja Bappelitbangda Kabupaten Sampang dan sebagai bahan evaluasi Kinerja Bappelitbangda Kabupaten Sampang dan diharapkan dapat diperoleh masukan dalam rangka memperbaiki kinerja Bappelitbangda Kabupaten Sampang dimasa yang akan datang.

B. STRUKTUR ORGANISASI BAPPELITBANGDA KABUPATEN SAMPANG

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati No. 9 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sampang, Bappelitbangda Kabupaten Sampang terdiri dari 1 Kepala Badan, 1 Sekretaris, 4 Kepala Bidang, 2 Sub Bagian, 13 Sub Koordiantor. dengan bagan sebagai berikut :



BAPPELITBANGDA KABUPATEN SAMPANG



Sumber : Bappelitbangda Kabupaten Sampang, 2022

Gambar 2.1
Susunan Organisasi Bappelitbangda Kabupaten Sampang



C. TUGAS DAN FUNGSI BAPPELITBANGDA KABUPATEN SAMPANG

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan daerah Daerah (Bappelitbangda) merupakan unsur perencana penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dipimpin oleh Kepala Badan, berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Bappelitbangda memiliki kedudukan dan struktur organisasi:

1. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah merupakan unsur penunjang urusan Pemerintahan bidang Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan;
2. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten;
3. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan serta tugas pembantuan; dan
4. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah dalam melaksanakan tugas dan menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyusunan kebijakan teknis bidang Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan;
 - b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan;
 - c. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan;
 - d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah bidang Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan; dan
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Susunan organisasi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah terdiri atas:

1. Adapun Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah terdiri atas :
 - a. Kepala Badan



BAPPELITBANGDA KABUPATEN SAMPANG

- b. Sekretariat, membawahi :
 - Sub Bagian Program;
 - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - Kelompok Jabatan Fungsional.
 - c. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, terdiri atas kelompok Jabatan Fungsional;
 - d. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, terdiri atas kelompok Jabatan Fungsional;
 - e. Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan, terdiri atas kelompok Jabatan Fungsional;
 - f. Bidang Penelitian dan Pengembangan, terdiri atas kelompok Jabatan Fungsional;
 - g. UPTD Badan; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
2. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
 3. Masing-masing Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan; dan
 4. Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

Tugas Dan Fungsi

1. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh unit kerja yang meliputi program dan pelaporan, umum dan kepegawaian serta keuangan, Sekretariat mempunyai fungsi :

- Pengelolaan pelayanan administrasi umum;
- Pengelolaan administrasi keuangan;
- Pengelolaan urusan rumah tangga, hubungan masyarakat dan protokol;
- Pengelolaan administrasi perlengkapan;
- Pengelolaan surat menyurat, kearsipan dan perpustakaan;
- Pembinaan organisasi dan tatalaksana badan;
- Pelaksanaan koordinasi penyusunan perundang-undangan;
- Pelaksanaan koordinasi penyusunan program, rencana anggaran, pengelolaan keuangan serta mempertanggungjawabkan pelaksanaannya;



BAPPELITBANGDA KABUPATEN SAMPANG

- Pengelolaan administrasi kepegawaian dan pembinaan sumber daya aparatur;
 - Pelaksanaan koordinasi penyelesaian masalah hukum (non yudisial);
 - Pelaksanaan koordinasi perencanaan jaringan teknologi informasi dan pemeliharannya (“*maintenance*”);
 - Pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah;
 - Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas bidang;
 - Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala badan; dan
 - Pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan tatalaksana badan.
- a. **Sub Bagian Umum dan Kepegawaian**, mempunyai tugas :
- Melaksanakan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat-surat, penggandaan naskah-naskah dinas, kearsipan dan perpustakaan;
 - Melaksanakan urusan rumah tangga dan keprotokolan;
 - Melaksanakan tugas bidang hubungan masyarakat;
 - Menyusun perencanaan dan pelaksanaan urusan kepegawaian;
 - Melaksanakan penyusunan kebutuhan perlengkapan, pengadaan, perawatan perlengkapan kantor dan pengamanan;
 - Membantu penyelesaian masalah hukum di luar pengadilan (non yudisial);
 - Menyiapkan bahan penataan kelembagaan, ketatalaksanaan dan perundang-undangan;
 - Menyiapkan bahan perencanaan jaringan teknologi informasi dan pemeliharannya (*maintenance*); dan
 - Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris.
- b. **Sub Bagian Program**, mempunyai tugas :
- Menghimpun data dan menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program;
 - Melaksanakan pengolahan data;
 - Melaksanakan perencanaan program;
 - Menghimpun data, menyusun rencana strategis badan dan evaluasinya;
 - Menghimpun data dan menyiapkan bahan penyusunan program anggaran, rencana kerja dan evaluasinya;
 - Menyiapkan bahan perencanaan sistem penganggaran dan kebijakan;
 - Menyiapkan bahan monitoring serta evaluasi organisasi dan pelaporan;
 - Menyusun laporan capaian program kegiatan; dan



- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris.

2. Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan

Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan penyusunan bahan perencanaan, laporan hasil pengendalian dan evaluasi serta pengelolaan data dan informasi lingkup Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan, Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan mempunyai fungsi:

- Penyusunan rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) dan rencana perangkat daerah (Renstra dan Renja) lingkup Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan;
- Pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah dan perangkat daerah lingkup Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan;
- Pengelolaan data dan informasi pembangunan sektoral sebagai bahan penyusunan rencana, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah lingkup Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan;
- Merencanakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan perencanaan pembangunan daerah;
- Pengintegrasian, harmonisasi dan sinergitas kegiatan Perangkat Daerah, provinsi, kementerian/lembaga, unsur masyarakat, akademisi dan swasta lingkup Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan;
- Pembinaan teknis perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah serta pengelolaan data dan informasi kepada perangkat daerah lingkup Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan; dan
- Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan; dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

3. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan penyusunan bahan perencanaan, laporan hasil pengendalian dan evaluasi serta pengelolaan data dan informasi lingkup Bidang



BAPPELITBANGDA KABUPATEN SAMPANG

Pemerintahan dan Pembangunan Manusia. Untuk melaksanakannya, Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia mempunyai fungsi:

- Penyusunan bahan rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) dan rencana perangkat daerah (Renstra dan Renja) lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- Pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah dan perangkat daerah lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- Pengelolaan data dan informasi pembangunan sektoral sebagai bahan penyusunan rencana, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- Pengintegrasian, harmonisasi dan sinergitas kegiatan perangkat daerah, provinsi, kementerian/lembaga, unsur masyarakat, akademisi, swasta dan desa lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- Pembinaan teknis perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah serta pengelolaan data dan informasi kepada perangkat daerah lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia; dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

4. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan penyusunan perencanaan, pengendalian dan evaluasi serta pengelolaan data dan informasi pembangunan daerah. Untuk melaksanakan tugasnya, Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah mempunyai fungsi:

- Penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD), dokumen rencana perangkat daerah (Renstra dan Renja) dan merumuskan bahan rencana pendanaan pembangunan non APBD Kabupaten Sampang;
- Pengintegrasian, harmonisasi dan sinergitas kegiatan perangkat daerah, provinsi, kementerian/lembaga, unsur masyarakat, akademisi dan swasta;



BAPPELITBANGDA KABUPATEN SAMPANG

- Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, pengendalian dan evaluasi perangkat daerah, serta pengendalian dan evaluasi pendanaan non APBD Kabupaten Sampang;
- Penyajian data dan informasi perencanaan pembangunan daerah serta pengendalian sistem data dan informasi pembangunan daerah;
- Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah; dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

5. Bidang Penelitian dan Pengembangan

Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan penelitian, pengembangan dan inovasi daerah. Untuk melaksanakan tugasnya Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai fungsi:

- Penyusunan bahan kebijakan teknis dan program penelitian dan pengembangan serta fasilitasi penerapan inovasi dan teknologi;
- Pelaksanaan penelitian dan pengembangan serta fasilitasi penerapan inovasi dan teknologi;
- Pelaksanaan pengkajian kebijakan pemerintah kabupaten;
- Pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan serta fasilitasi penerapan inovasi dan teknologi;
- Pelaksanaan kerjasama, koordinasi dan sinkronisasi penelitian dan pengembangan serta fasilitasi penerapan inovasi dan teknologi;
- Penyebarluasan informasi hasil penelitian dan pengembangan serta inovasi dan teknologi;
- Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang penelitian dan pengembangan; dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala badan.

6. Unit Pelaksana Teknis

- UPTD adalah unsur pelaksana teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu;
- UPTD dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala Badan; dan



BAPPELITBANGDA KABUPATEN SAMPANG

- Pembentukan UPTD dapat dilakukan dengan mempertimbangkan peningkatan pelayanan dan beban kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

7. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai tugas Jabatan Fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

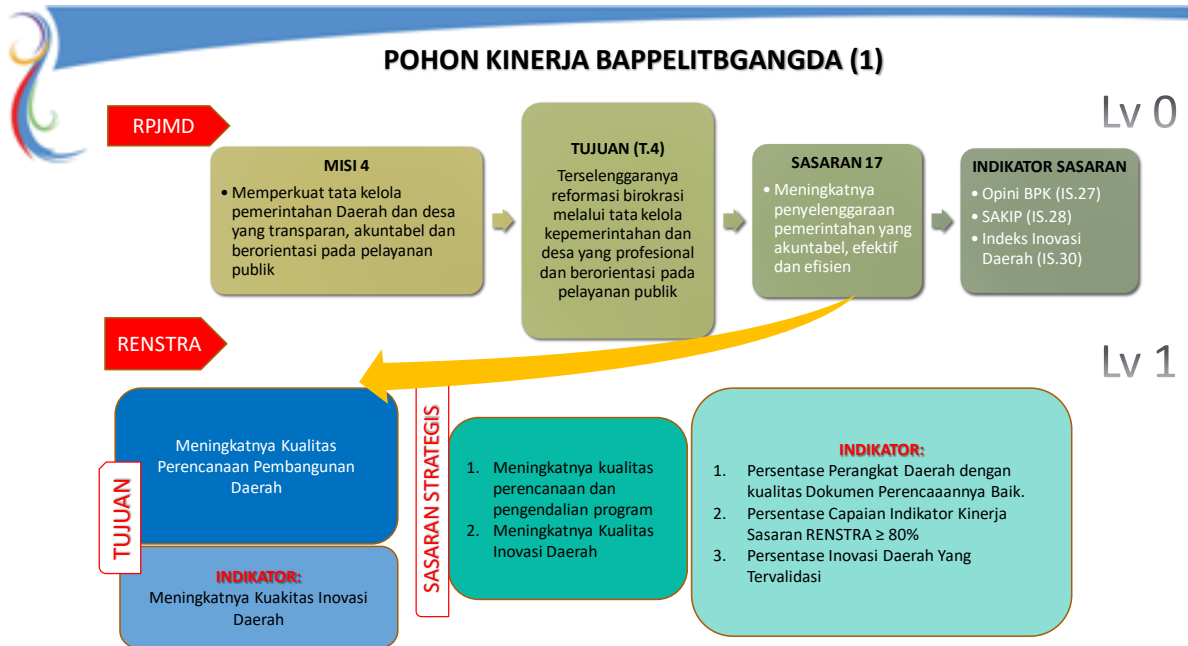
D. ISU STRATEGIS BAPPELITBANGDA KABUPATEN SAMPANG

Hasil analisa isu strategis Bappelitbangda Kabupaten Sampang seperti yang tertuang didalam dokumen Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2020-2024 yang membutuhkan pemecahan dan penanganan segera di lingkup Bappelitbangda Kabupaten Sampang diantaranya :

- a. Peningkatan pengendalian dan evaluasi atas target-target kinerja yang tertuang dalam dokumen perencanaan;
- b. Peningkatan koordinasi perencanaan dan pengendalian di masing-masing lingkup Bidang Bappelitbangda;
- c. Peningkatan jumlah dan kapasitas SDM Bappelitbangda dalam melaksanakan tugas dan fungsinya;
- d. Peningkatan kualitas penelitian dan pengembangan.

e. CASCADING BAPPELITBANGDA KABUPATEN SAMPANG

Berdasarkan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah selanjutnya dijabarkan kedalam Cascading yang merupakan dokumen pernyataan proses penjabaran, penyelarasan dan penurunan kinerja secara bertahap secara vertikal dari level yang lebih tinggi ke level yang lebih rendah untuk mewujudkan target yg ingin dicapai dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yg telah ditetapkan dalam Renstra dan dijadikan acuan dalam penyusunan perjanjian kinerja.



f. ASPEK STRATEGIS DAN PERMASALAHAN PERANGKAT DAERAH

Perencanaan pembangunan antara lain dimaksudkan agar layanan Perangkat Daerah senantiasa mampu menyelaraskan diri dengan lingkungan dan aspirasi pengguna layanan. Oleh karena itu perhatian kepada mandat dari masyarakat dan lingkungan eksternalnya merupakan perencanaan dari luar ke dalam yang tidak boleh diabaikan.

Permasalahan pelayanan Perangkat Daerah merupakan penyebab terjadinya kesenjangan antara kinerja pelayanan yang dicapai saat ini dengan yang di rencanakan serta antara apa yang ingin di capai di masa datang dengan konsisi riil saat perencanaan dibuat. Suatu permasalahan pelayanan Perangkat Daerah dianggap memiliki nilai prioritas untuk dikerjakan apabila berhubungan dengan pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, khususnya untuk mendukung pencapaian tujuan-tujuan pembangunan.

Dari rumusan permasalahan yang telah diidentifikasi berdasarkan data kesenjangan (*gap*) antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang di rencanakan, kemudian rumusan permasalahan tersebut dipetakan menjadi masalah pokok, masalah dan akar masalah. Seperti pada tabel berikut ini:



Tabel I.1
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran
Perangkat Daerah

No.	Masalah	Pokok Masalah	Akar Masalah
1.	Persentase dokumen perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas sudah tercapai 100% namun dalam mempertahankan kualitas capaian tersebut terdapat beberapa kendala	Fungsi koordinasi perencanaan masih kurang optimal	Faktor Internal: Keterbatasan SDM pada Bappelitbangda dalam melaksanakan fungsi koordinasi perencanaan Faktor Eksternal: Kurangnya dukungan Perangkat Daerah dalam rangka mewujudkan dokumen perencanaan pembangunan yang berkualitas
2.	Belum tercapainya target pada indikator kinerja "Persentase capaian indikator kinerja sasaran dalam RPJMD $\geq 80\%$ " secara sempurna	Dari 36 indikator sasaran yang tertuang pada Perubahan RPJMD Kabupaten Sampang Tahun 2019-2020 terdapat 7 indikator yang nilai capaiannya $\geq 80\%$, sehingga nilai realisasi indikator "Persentase capaian indikator kinerja sasaran dalam RPJMD $\geq 80\%$ " sebesar 80,55 persen dari target 95,00 persen. Sedangkan capaiannya memiliki nilai 84,79 persen.	Faktor Internal: Kurangnya koordinasi dan pengendalian di lingkup bidang Bappelitbangda dalam rangka mengawal capaian indikator sasaran RPJMD secara periodik hal ini bertujuan supaya Perangkat Daerah mampu mengevaluasi kinerjanya sehingga mampu mencapai target kinerja sebagaimana telah ditentukan sebelumnya. Faktor Eksternal: Terdapat kendala teknis pada Perangkat Daerah masing-masing sehingga Perangkat Daerah pengampu indikator sasaran RPJMD tersebut tidak mampu mencapai target
3.	Persentase Perangkat Daerah dengan Kualitas Dokumen Perencanaan Baik sudah tercapai 100% namun dalam prosesnya mengalami	Fungsi koordinasi perencanaan masih kurang optimal	Faktor Internal: Keterbatasan SDM pada Bappelitbangda dalam melaksanakan fungsi



No.	Masalah	Pokok Masalah	Akar Masalah
	beberapa kendala		koordinasi perencanaan Faktor Eksternal: Kurangnya koordinasi Perangkat Daerah dalam penyusunan dokumen perencanaannya Kapasitas personel penyusun dokumen perencanaan Perangkat Daerah masih perlu ditingkatkan
4.	Persentase hasil kajian penelitian dan pengembangan yg dijadikan dasar pembangunan 100% namun dalam prosesnya mengalami beberapa kendala	Terdapat usulan kajian kelitbangan Perangkat Daerah yang masih belum terakomodir	Faktor Internal: Keterbatasan SDM Bidang Litbang Faktor Eksternal: Masih terdapat usulan kajian dari Perangkat Daerah yang belum mengacu pada prioritas pembangunan
5	Kurang optimalnya pelaksanaan inovasi pada OPD	Kurang responnya PD terhadap pelaporan inovasi daerahnya	Faktor Internal: SDM pelaksana inovasi kurang serius terhadap pelaksanaan inovasi OPD masing--masing dan masih bekerja berdasarkan budaya kerja lama Faktor Eksternal: Marketing branding tidak ditindak lanjuti

Sumber : Renstra Bappelitbangda Kabupaten Sampang, 2019-2024

Dari identifikasi permasalahan pelayanan dapat dirumuskan isu-isu strategis sebagai berikut:

- Peningkatan pengendalian dan evaluasi atas target-target kinerja yang tertuang dalam dokumen perencanaan;



BAPPELITBANGDA KABUPATEN SAMPANG

- Peningkatan koordinasi perencanaan dan pengendalian di masing-masing lingkup Bidang Bappelitbangda;
- Peningkatan jumlah dan kapasitas SDM Bappelitbangda dalam melaksanakan tugas dan fungsinya; dan
- Peningkatan kualitas penelitian dan pengembangan.

Beberapa isu strategis tersebut dapat ditelaah lebih dalam dan dikaitkan pada isu pengarusutamaan gender. Hal tersebut perlu dilakukan untuk melakukan analisa lebih lanjut terhadap program dan kegiatan perangkat daerah. Analisis gender adalah analisis untuk mengidentifikasi dan memahami pembagian kerja/peran laki-laki dan perempuan, akses kontrol terhadap sumber-sumber daya pembangunan, partisipasi dalam proses pembangunan dan manfaat yang mereka nikmati, pola hubungan antara laki-laki dan perempuan yang timpang yang di dalam pelaksanaannya memperhatikan faktor lainnya. Dalam analisa gender ini juga dilakukan proses identifikasi masalah terutama mengenai isu gender yaitu suatu kondisi yang menunjukkan kesenjangan laki-laki dan perempuan atau ketimpangan gender, yaitu kesenjangan antara kondisi sebagaimana yang dicita-citakan dengan kondisi gender sebagaimana adanya.

g. PETA PROSES BISNIS BAPPELITBANGDA KABUPATEN SAMPANG

Dokumen Cascading selanjutnya dibandingkan dengan peta proses bisnis yang merupakan diagram yang menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi/level untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi agar menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan.

Penyusunan peta proses bisnis menjadi salah satu faktor suksesnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi di instansi pemerintah. Penyusunan peta proses bisnis merupakan bagian dari penataan tata laksana yang dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien dan terukur pada masing-masing instansi pemerintah.

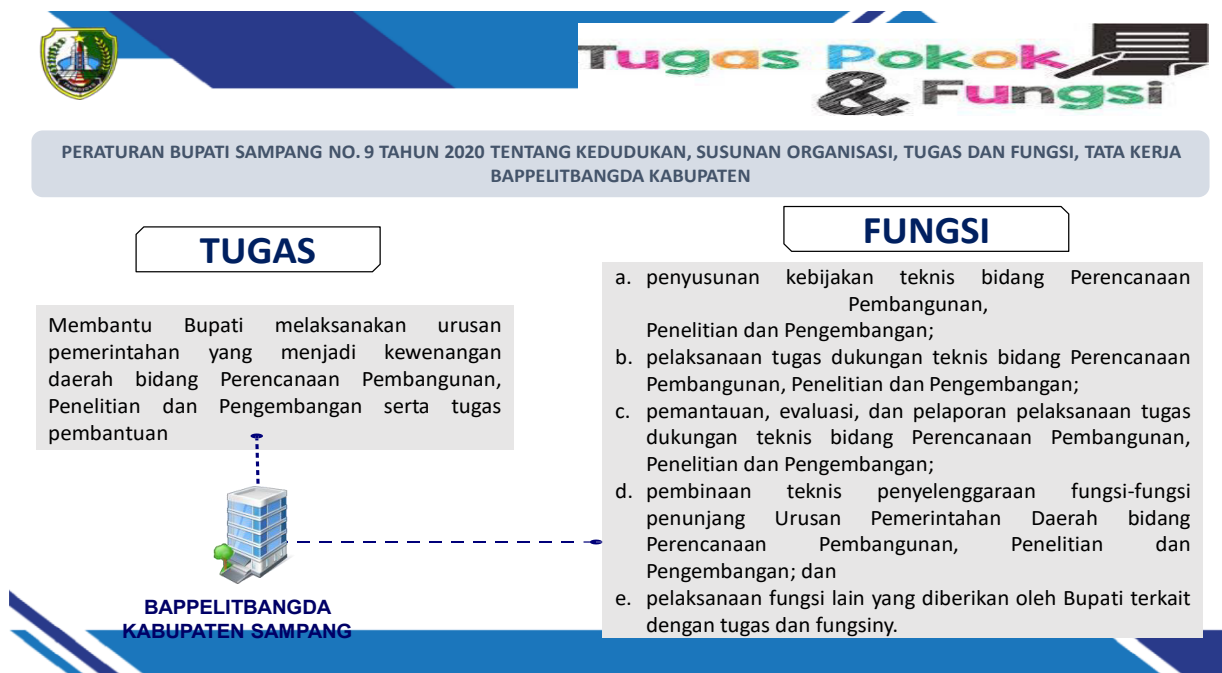
Jika proses bisnis yang berbelit-belit dan tumpang-tindih antara satu unit organisasi dengan unit organisasi yang lain akan membuat organisasi menjadi lambat untuk bekerja. Oleh karena itu, setiap unit organisasi memerlukan peta proses bisnis yang mampu menggambarkan proses bisnis yang dilakukan oleh organisasi dalam mencapai visi, misi, dan tujuan Bappelitbangda Kabupaten Sampang.



BAPPELITBANGDA KABUPATEN SAMPANG

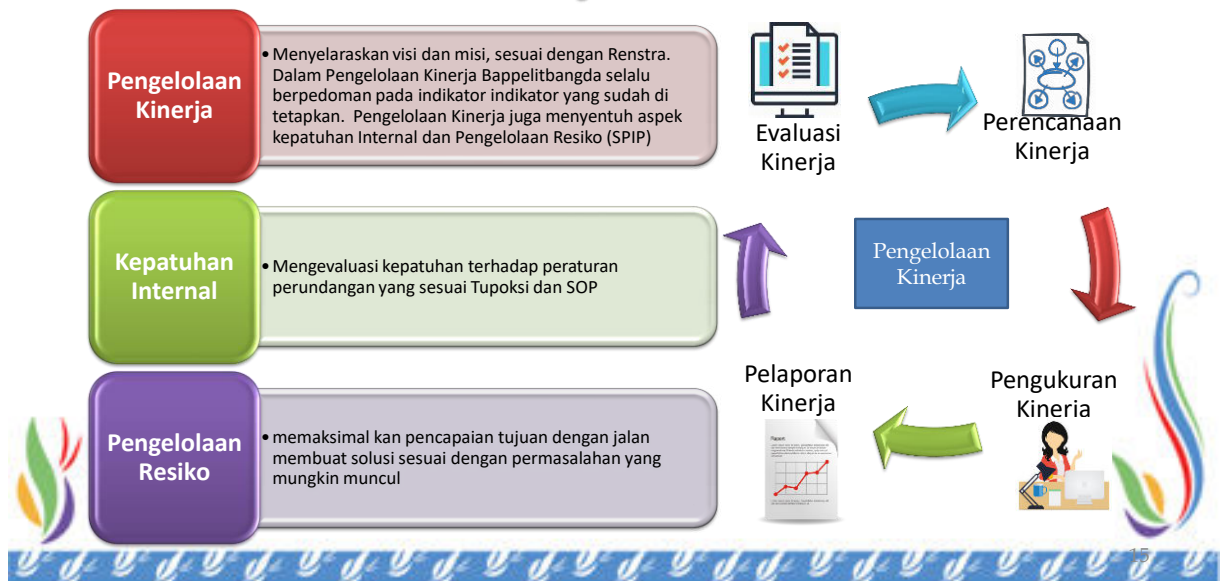
Tujuan penyusunan peta proses bisnis adalah untuk menjadi dasar pengambilan keputusan strategis terkait pengembangan organisasi dan sumber daya manusia, serta penilaian kinerja. Peta proses bisnis bermanfaat untuk melihat potensi masalah yang ada di dalam pelaksanaan suatu proses sehingga solusi penyempurnaan proses lebih terarah, serta memiliki standar pelaksanaan pekerjaan sehingga memudahkan dalam mengendalikan dan mempertahankan kualitas pelaksanaan pekerjaan. **Pada probis Bappelitbangda dapat dilihat dokumen Probis Bappelitbangda Tahun 2022.**

Berikut Peta Proses Bisnis Bappelitbangda Kabupaten Sampang :





Proses Bisnis Manajemen





BAPPELITBANGDA KABUPATEN SAMPANG

Meningkatnya Kualitas Perencanaan Kinerja yang Akuntabel
IK : (1) Nilai Perencanaan Kinerja Daerah
(2) Nilai Pengukuran Kinerja Daerah

Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Daerah yang berkualitas
IK : Persentase Dokumen Perencanaan yang telah memenuhi standard

Meningkatnya Kualitas Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
IK : Persentase Capaian Indikator Kinerja Sasaran Renstra >80 %

Terwujudnya Keselarasan Perencanaan Pembangunan Daerah
IK : Persentase keselarasan antar dokumen perencanaan

Meningkatnya Kesesuaian Prioritas Pembangunan Dengan Isu Strategis
IK : Persentase Prioritas Pembangunan yang sesuai dengan Isu Strategis (Dok. Cascading)

Terwujudnya Penelitian/Kajian dan Inovasi dalam mendukung Kebijakan Daerah
IK : (1) Persentase Penelitian/Kajian yang mendukung kebijakan Daerah
(2) Indeks Inovasi Daerah

Terlaksananya pengendalian dan evaluasi secara berkala
IK : Persentase OPD dengan hasil capaian kinerja baik

Terwujudnya keselarasan perencanaan Daerah, Provinsi, dan Pusat
IK : (1) Persentase keselarasan prioritas Daerah dengan Provinsi
(2) Persentase keselarasan prioritas Daerah dengan Pusat

Terwujudnya keselarasan antar dokumen perencanaan Daerah
IK : Persentase kinerja pembangunan yang selaras antar dokumen perencanaan Daerah

Terwujudnya keselarasan dokumen perencanaan Daerah dengan Dokumen Perencanaan PS
IK : Persentase Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat daerah yang selaras

Terwujudnya perencanaan partisipatif
IK : Persentase Usulan masyarakat yang diakomodir

Tersedianya data perencanaan pembangunan yang berkualitas
IK : Persentase Ketersediaan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan yang tersedia

Perumusan Kebijakan Yang Sesuai Isu Strategis
IK : Persentase Perumusan Kebijakan Yang Sesuai Isu Strategis (Dok Pokin Kabupaten)

Implementasi Penelitian/Kajian
IK : Persentase Penelitian/Kajian yang ditindaklanjuti

Terlaksananya Pengembangan Inovasi
IK : Persentase tingkat kematangan inovasi tinggi

Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan Daerah
IK : Persentase OPD yang pelaksanaan pembangunan daerahnya terkendali

KISS perencanaan Pusat-Provinsi-Daerah
IK : (1) Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan yang selaras Daerah-Provinsi
(2) Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan yang selaras Daerah-Pusat

Konsistensi program dalam RPJMD-RKPD
IK : Persentase program dalam RPJMD yang diakomodir dalam RKPD

KISS perencanaan Daerah-Perangkat Daerah
IK : (1) Rancangan dokumen Perencanaan Pembangunan yang selaras RPJMD-Renstra
(2) Rancangan dokumen Perencanaan Pembangunan yang selaras RKPD-Renja

Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah
IK : Berita Acara Musrembang

Meningkatnya Fungsi Forum Data
IK : Laporan Hasil Koordinasi Forum data

Perumusan Isu Strategis
IK : Jumlah Isu Strategis

Penyusunan Penelitian/Kajian sesuai prioritas Daerah
IK : Persentase Penelitian/Kajian yang sesuai prioritas Daerah

Implementasi Inovasi
IK : Persentase inovasi yang diimplementasikan

Evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah
IK : Jumlah pelaporan evaluasi yang disusun

Konsultasi Publik dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah
IK : Berita Acara Konsultasi Publik

Meningkatnya Fungsi Simpul Jaringan
IK : Persentase simpul jaringan yang aktif

Pelaksanaan Laporan Akhir
IK : Lapr. Antara Lapr Akhir

Uji Coba Rancangan Bangun Inovasi
IK : Dokumen Rancang Bangun

Koordinasi dan monitoring pelaksanaan pembangunan daerah
IK : Jumlah koordinasi dan monitoring yang dilaksanakan

Pengumpulan dan analisis data/informasi perencanaan pembangunan
IK : Jumlah Data/Informasi Yang Dianalisis

Forum diskusi Lapr Awal
IK : Lapr Awal penelitian

Sosialisasi Penengembangan Inovasi
IK : Lapr Sosialisasi Inovasi

Sosialisasi dan Pembinaan Pemanfaatan Data dan Informasi Pembangunan Daerah
IK : Jumlah Peserta dan Sosialisasi/Sosialisasi dan Pembinaan Pemanfaatan Data dan Informasi Pembangunan Daerah
IK : Jumlah Peserta dan Sosialisasi

Pengumpulan data dan analisa data
IK : Lapr Awal Penelitian

Forum Diskusi Usulan Penelittian/Kajian
IK : Jumlah Usulan Penelitian/Kajian

Koordinasi dengan OPD dan Staekholder Terkait
IK : Lapr. Hasil Koordinasi/Koordinasi dengan OPD dan Staekholder Terkait
IK : Lapr. Hasil Koordinasi

Identifikasi kebutuhan penelitian/kajian sesuai prioritas
IK : Persentase realisasi kebutuhan penelitian/kajian



BAB II

Perencanaan Kinerja

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Tujuan merupakan penjabaran/implementasi dari sasaran RPJMD yang akan dilaksanakan/dicapai oleh Perangkat Daerah. Tujuan perangkat daerah yang mengacu pada RPJMD dikompilasikan dengan isu-isu dan analisisis strategik serta merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan pada jangka waktu 1 s/d 5 tahunan. Tujuan ini tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, akan tetapi harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang.

Mengacu pada sasaran RPJMD Kabupaten Sampang, Bappelitbangda Kabupaten Sampang yang mendukung pencapaian misi 4 Bupati Sampang memiliki tujuan “Terwujudnya dokumen perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas”



Tabel 2.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah (Renstra 2019-2024)

Tujuan		Sasaran	
Uraian	Indikator	Uraian	Indikator
Mewujudkan dokumen perencanaan pembangunan yang berkualitas	Persentase Dokumen Perencanaan Pembangunan yang berkualitas	Meningkatnya kualitas perencanaan dan pengendalian program	Persentase Perangkat Daerah dengan Kualitas Dokumen Perencanaan Baik
			Persentase Capaian Indikator kinerja Sasaran Renstra Perangkat Daerah $\geq 80\%$
		Meningkatnya kualitas penelitian dan pengembangan	Persentase hasil kajian penelitian dan pengembangan yang dijadikan dasar pembangunan

Sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kinerja Bappelitangda, telah ditetapkan indikator kinerja utama sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan. Indikator kinerja utama Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sampang, yaitu :

- a. Persentase Dokumen Perencanaan Pembangunan yang berkualitas
- b. Persentase Perangkat Daerah dengan Kualitas Dokumen Perencanaan Baik
 - 1. Berorientasi pada Hasil
 - 2. Target Jelas
 - 3. Indikator SMART
 - 4. Konsistensi dengan RPJMD/Renstra
- c. Persentase Capaian Indikator Kinerja Sasaran Renstra Perangkat Daerah $> 80\%$:
- d. Persentase hasil kajian penelitian dan pengembangan yang dijadikan dasar pembangunan.



BAPPELITBANGDA KABUPATEN SAMPANG

Tabel 2.2
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Bappelitbangda Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024

NO.	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR	Kondisi Awal Renstra (2018)	Realisasi/Target Kinerja						Kondisi Akhir Renstra (2024)
				2019 (Realisasi)	2020 (Realisasi)	2021 (Target)	2022 (Target)	2023 (Target)	2024 (Target)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Tujuan 1:									
	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	Nilai Perencanaan Kinerja Daerah	74,5	77,13	78,63	78,97	79	80	80	80
		Nilai Pengukuran Kinerja Daerah	63,84	67,16	68,56	69	70	71	72	72
	Sasaran 1:									
1	Meningkatnya kualitas perencanaan dan pengendalian program	Persentase PD dengan kualitas Dokumen Perencanaannya Baik	100	100	100	100	100	100	100	100
			Perubahan target kinerja			80	81	82	83	83
	Sasaran 2:									
2	Meningkatnya Kualitas Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase Capaian Indikator Kinerja Sasaran RENSTRA ≥ 80%	n/a	100	100	100	100	100	100	100
			Perubahan target kinerja			80	81	82	83	83

Sumber: P-RENSTRA Bappelitbangda 2019-2024



BAPPELITBANGDA KABUPATEN SAMPANG

Mengacu visi-misi Perubahan RPJMD Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024 seperti yang telah dibahas pada bab sebelumnya, Bappelitbangda Kabupaten Sampang mendukung pada **misi 4** serta mendukung pada pencapaian sasaran **“Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, efektif dan efisien”**, sehingga penjabaran atas sasaran Perubahan RPJMD tersebut menjadi tujuan yang akan dicapai Bappelitbangda dalam kurun waktu 2019-2024. Adapun Tujuan dan Sasaran Perubahan Renstra Bappelitbangda Tahun 2019-2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
Perubahan Renstra Bappelitbangda Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024

NO.	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR
1	2	3
	Tujuan 1:	
	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	Nilai Perencanaan Kinerja Daerah Nilai Pengukuran Kinerja Daerah
	Sasaran 1:	
1	Meningkatnya kualitas perencanaan dan pengendalian program	Persentase PD dengan kualitas Dokumen Perencanaannya Baik
	Sasaran 2:	
2	Meningkatnya Kualitas Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase Capaian Indikator Kinerja Sasaran RENSTRA $\geq 80\%$

Penetapan indikator kinerja Perangkat Daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah yang ditetapkan menjadi Perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU). Indikator Kinerja Utama diambil dari indikator sasaran strategic dimana Perubahan IKU yang ditetapkan oleh Bappelitbangda adalah sebagai berikut:



BAPPELITBANGDA KABUPATEN SAMPANG

1. Nilai Perencanaan Kinerja Daerah;
2. Nilai Pengukuran Kinerja Daerah; dan
3. Persentase Perangkat Daerah dengan Kualitas Dokumen Perencanaan Baik
4. Persentase Capaian Indikator Kinerja Sasaran RENSTRA $\geq 80\%$.

Perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU) mengalami perubahan berdasarkan penajaman hasil evaluasi SAKIP Bappelitbangda Tahun 2021. Dimana Perubahan IKU ini dilaksanakan pada Tahun 2022

Tabel 2.3
Indikator Kinerja Utama (IKU)
Perubahan Renstra Bappelitbangda Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL DAN FORMULA PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	Nilai Perencanaan Kinerja Daerah	Komponen Perencanaan Kinerja Dalam Penilaian SAKIP	LHE SAKIP	Bappeda Litbang
		Nilai Pengukuran Kinerja Daerah	Komponen Pengukuran Kinerja Dalam Penilaian SAKIP	LHE SAKIP	Bappeda Litbang
2	Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Daerah yang berkualitas	Persentase PD dengan kualitas Dokumen Perencanaannya Baik	Jumlah Dokumen Perencanaan PD yang telah memenuhi standart sesuai kertas kerja Bappeda Litbang		Bappeda Litbang
3	Meningkatnya Kualitas Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase Capaian Indikator Kinerja Sasaran RENSTRA $\geq 80\%$	Persentase Capaian Indikator Kinerja Sasaran PD yang telah tercapai $\geq 80\%$		Bappeda Litbang

Sumber : P-Renstra Bappelitbangda Kabupaten Sampang, 2019-2024

Pada Tahun 2022 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sampang Kabupaten Sampang berkomitmen untuk melaksanakan kinerja sebagaimana yang telah digariskan dalam Rencana Strategis dan RKT, dengan menetapkan sasaran strategis, indikator kinerja dan target di tahun 2022 sebagai berikut:



Tabel 2.3
Rencana Kinerja Bappelitbangda Tahun 2022

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya kualitas perencanaan dan pengendalian program	1 Persentase Perangkat Daerah dengan Kualitas Dokumen Perencanaan Baik Kriteria Baik: a. Berorientasi pada Hasil b. Target Jelas c. Indikator SMART d. Konsistensi dengan RPJMD/Renstra	81%
2	Meningkatnya Kualitas Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	2 Persentase Capaian Indikator kinerja Sasaran Renstra Perangkat Daerah \geq 80%	81%

Penetapan kinerja merupakan kesepakatan antara pihak yang menerima tugas dan tanggung jawab kinerja dengan pihak yang memberikan tugas dan tanggungjawab kinerja. Adapun rencana kinerja Bappelitbangda ditetapkan dalam Penetapan Kinerja sebagai berikut:

Perjanjian Kinerja inilah yang menjadi dasar penyusunan perjanjian kinerja seluruh pegawai di lingkungan Bappelitbangda Kabupaten Sampang, mulai dari level pejabat tertinggi (eselon II) sampai ke pelaksana berdasarkan tugas dan fungsi serta hasil turunan (cascading) dari perjanjian kinerja atasannya. Untuk mewujudkan kinerja tersebut, Bappelitbangda Kabupaten Sampang mendapat dukungan anggaran belanja langsung dari APBD sebesar Rp 7.523.120.653 yang digunakan untuk melaksanakan 17 kegiatan, 56 sub kegiatan yang terangkum dalam 4 program sebagai berikut:



BAPPELITBANGDA KABUPATEN SAMPANG

Program	Anggaran (Rp.)
 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.638.824.470,00
 Program Perencanaan, Pengendalian dan Ealuasi Pembangunan Daerah	1.105.686.806,00
 Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	1.238.908.156,00
 Program Penelitian dan Pengembangan	539.701.221,00
TOTAL	7.523.120.653

**BAPPELITBANGDA KABUPATEN SAMPANG**

Tabel 2.6
Perjanjian Kinerja Perubahan Bappelitbangda Tahun 2022

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Meningkatnya kualitas perencanaan dan pengendalian program	1 Persentase Perangkat Daerah dengan Kualitas Dokumen Perencanaan Baik Kriteria Baik: a. Berorientasi pada Hasil b. Target Jelas c. Indikator SMART d. Konsistensi dengan RPJMD/Renstra	100%
		2 Persentase Capaian Indikator Kinerja Sasaran RENSTRA \geq 80%	95%
2	Meningkatnya kualitas penelitian dan pengembangan yang dipublikasikan dan ditindaklanjuti	1 Persentase hasil kajian penelitian dan pengembangan yg dijadikan dasar pembangunan	100%

	Program	Anggaran	Keterangan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 4.567.935.972,00	APBD
2	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Rp 1.184.059.251,00	APBD
3	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp 1.226.702.462,00	APBD
4	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Rp 499.999.271,00	APBD



Tabel 2.5
Perjanjian Kinerja Perubahan Bappelitbangda Tahun 2022

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	1 Nilai Perencanaan Kinerja Daerah	79
		2 Nilai Pengukuran Kinerja Daerah	70
2	Meningkatnya kualitas perencanaan dan pengendalian program	1 Persentase Perangkat Daerah dengan Kualitas Dokumen Perencanaan Baik	81,00%
3	Meningkatnya Kualitas Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	1 Persentase Capaian Indikator Kinerja Sasaran Renstra >80 %	81,00%

	Program	Anggaran	Keterangan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 4.638.824.470,00	APBD
2	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Rp 1.105.686.806,00	APBD
3	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp 1.238.908.156,00	APBD
4	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Rp 539.701.221,00	APBD



BAB III

Akuntabilitas Kinerja

A. CAPAIAN KINERJA TAHUN 2022

Pengukuran capaian kinerja Bappelitbangda Kabupaten Sampang dilakukan dengan cara membandingkan antara target setiap indikator sasaran dalam perjanjian kinerja dengan realisasinya. Secara keseluruhan kinerja Bappelitbangda Kabupaten Sampang dinyatakan “berhasil”, karena rata-rata capaiannya diatas 85% dari target.

Akuntabilitas Bappelitbangda Kabupaten Sampang merupakan kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan Bappelitbangda Kabupaten Sampang kepada pihak-pihak yang memiliki kewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban. Sedangkan Kinerja Bappelitbangda Kabupaten Sampang adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran atau tujuan Bappelitbangda sebagai penjabaran dari strategi Bappelitbangda yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan ketidakberhasilan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan kegiatan yang telah ditetapkan.



Tabel 3.1
Kriteria Penilaian Capaian Kinerja

No	Nilai Capaian Kinerja		Pemberian Atribut
	%	Keterangan Presentase	
1.	>100%	Lebih dari Seratus Persen	Sangat Baik
2.	75% s.d 100%	Tujuh puluh persen sampai seratus persen	Baik
3.	55% s.d <75%	Lima puluh lima persen sampai kurang dari tujuh puluh persen	Cukup
4.	X<55%	Di bawah lima puluh lima persen	Kurang

A. ANALISA CAPAIAN KINERJA

Untuk mengetahui tingkat capaian kinerja, maka perlu diketahui tingkat capaian sasaran yang telah ditentukan sebagai berikut :

1. Tingkat capaian kinerja kegiatan, menggambarkan tingkat capaian seluruh indikator kinerja kegiatan termasuk indikator pemicu (indikator input dan output).
2. Tingkat capaian kinerja kegiatan dan program, menggambarkan tingkat capaian indikator pemicu/pendukung (indikator input dan output).
3. Tingkat capaian kinerja sasaran, menggambarkan capaian kinerja masing-masing sasaran yang ditentukan berdasarkan indikator berupa hasil yang dicapai (indikator outcome).

Pengukuran tingkat capaian kinerja sasaran yang ditentukan oleh indikator hasil indikator outcome), indikator tersebut sangat dipengaruhi oleh input dan output setiap kegiatan yang dilaksanakan.

Sasaran yang ditetapkan oleh Bappelitbangda Kabupaten Sampang dalam Tahun Anggaran 2022 adalah :

1. Meningkatnya kualitas perencanaan dan pengendalian program
2. Meningkatnya Kualitas Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah



Tabel 3.2
Capaian Kinerja BAPPELITBANGDA Kabupaten Sampang

Sasaran				Realisasi Tahun 2021	Tahun 2022		% Capaian	Kategori	
Uraian	Indikator Kinerja		Satuan		Target	Realisasi			
1	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	a	Nilai Perencanaan Kinerja Daerah	%	78,97	79	80,5	101,90	Sangat Tinggi
		b	Nilai Pengukuran Kinerja Daerah	%	69	70	70	100	Sangat Tinggi
2	Meningkatnya kualitas perencanaan dan pengendalian program	a	Persentase Perangkat Persentase PD dengan kualitas Dokumen Perencanaannya Baik	%	100	81	84,62	104,47	Sangat Tinggi
3	Meningkatnya Kualitas Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	b	Persentase Capaian Indikator kinerja Sasaran RENSTRA Perangkat Daerah $\geq 80\%$	%	93,96	81	84,62	104,47	Sangat Tinggi

Dari hasil penilaian capaian 3 sasaran diukur melalui keberhasilan pencapaian 4 (empat) indikator kinerja.

Tabel 3.2.1 Capaian Kinerja Sasaran (1) Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah, indikator (1) Nilai Perencanaan Kinerja Daerah

Sasaran				Realisasi Tahun 2021	Tahun 2022		% Capaian	Kategori	
Uraian	Indikator Kinerja		Satuan		Target	Realisasi			
1	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	a	Nilai Perencanaan Kinerja Daerah	%	78,97	79	80,5	101,90	Sangat Tinggi

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan hal-hal sebagai berikut :

- a. Meskipun telah dilakukan penyempurnaan pada perencanaan kinerja tingkat PD, namun masih ditemukan perumusan sasaran strategis yang belum berorientasi outcome dan indikator kinerja yang ditetapkan tidak relevan dan cukup untuk mengukur keberhasilan penapaian kinerja yang ditetapkan pada sebagian PD.



- b. Pohon kinerja yang disusun sebagian keil PD belum sepenuhnya berdasarkan kerangka berpikir /logical ramework dan hubungan antara level kinerja belum disusun dengan mempertimbangkan *critical succes factor* (CSF).

Tabel 3.2.2 Capaian Kinerja Sasaran (1) Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah, indikator (1) Nilai Pengukuran Kinerja Daerah

Sasaran				Realisasi Tahun 2021	Tahun 2022		% Capaian	Kategori	
Uraian	Indikator Kinerja		Satuan		Target	Realisasi			
1	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	a	Nilai Pengukuran Kinerja Daerah	%	69	70	70	100,00	Sangat Tinggi

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan hal-hal sebagai berikut :

- a. Meskipun telah memiliki pengukuran dan pengumpulan data kinerja seara elektronik. Namun pemanfaatan aplikasi ini belum maksimal, karena sebagian kecil PD yang memanfaatkan aplikasi ini dengan mengisi data pengukuran kinerjanya.
- b. Pemantauan yang dilakukan masih berfokus pada penyerapan anggaran belum mengarah ke pencapaian kinerja. Pemantauan belum dilakukan secara berjenjang sehingga realisasi pencapaian kinerja tidak terkendali dengan baik.

Tabel 3.2.3 Capaian Kinerja Sasaran (2) Meningkatnya kualitas perencanaan dan pengendalian program

Sasaran				Realisasi Tahun 2020	Tahun 2022		Capaian Tahun 2022	Kategori	
Uraian	Indikator Kinerja		Satuan		Target	Realisasi			
1	Meningkatnya kualitas perencanaan dan pengendalian program	1	Persentase Perangkat Daerah dengan Kualitas Dokumen Perencanaan Baik	%	100	81	84,62	104,47	Sangat Tinggi



BAPPELITBANGDA KABUPATEN SAMPANG

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan hal-hal sebagai berikut:

- a. Jumlah Perangkat Daerah dengan Kualitas Dokumen Perencanaan Baik sebanyak 33 PD dari 39 PD atau 84,62%. Realisasi tersebut mencapai target seluruh PD telah menyelesaikan penyusunan dokumen Renstra yang mengacu pada dokumen RPJMD. Kertas kerja dalam rangka pengukuran tersebut dapat dilihat sebagaimana terlampir dalam bentuk **soft copy**.

Berikut kertas kerja asistensi RENJA-RENSTRA 2022 yang dikerjakan BAPPELITBANGDA Kabupaten Sampang :

ASISTENSI DOKUMEN RENJA PERANGKAT DAERAH

KABUPATEN SAMPANG TAHUN

NO.	URAIAN	KOMPONEN PENILAIAN	BOBOT	SKOR PENILAIAN (SKALA 1-100)	TOTAL	REKOMENDASI KONSOLIDATOR
I	BAB I. PENDAHULUAN	Apakah Landasan Hukum yang dituangkan sudah relevan dan mengacu pada Ranperbup Renja Perangkat Daerah	5%	100	5	
II	BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	Apakah hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah telah tersaji dengan baik dan benar?	15%	100	15	
		Apakah Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah telah tersaji dengan baik?	5%	100	5	
		Apakah Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah telah disajikan dengan baik?	5%	100	5	
		Review terhadap Rancangan Awal RKPd Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat (Bagi Perangkat Daerah yang memiliki usulan hasil Musrenbang dan Pokir)	5%	100	5	
III	BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	Telaahan terhadap Kebijakan Nasional (Keterkaitan Bab 8 RPJMD dengan Renja PD)	5%	100	5	
		Apakah tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah telah selaras dengan Renstra Perangkat Daerah	15%	100	15	
		Apakah Target-target Tujuan dan Sasaran pada tahun rencana telah berdasarkan hasil telaahan dan evaluasi pada bab sebelumnya	10%	100	10	



BAPPELITBANGDA KABUPATEN SAMPANG

		Apakah Program pada Renja telah selaras dengan RPJMD	15%	100	15	
IV	BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	Apakah Renja Perangkat Daerah telah selaras dengan RKPD (Matrik Renja - Matrik RKPD)	10%	100	10	
		Apakah inovasi Perangkat Daerah dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah telah dituangkan	5%	100	5	
V	DILUAR BAB	Apakah sitematika Renja Perangkat Daerah sudah memenuhi kaidah-kaidah yang berlaku?	5%	100	5	
			100%		100	Sangat Baik

HASIL PENILAIAN

INTERVAL PENILAIAN RENJA PD	KRITERIA PENILAIAN
91 ≤ 100	Sangat Baik
76 ≤ 90	Baik
66 ≤ 75	Cukup
51 ≤ 65	Kurang
≤ 50	Buruk

Tabel 3.2.4 Capaian Kinerja Sasaran (2) Meningkatnya kualitas perencanaan dan pengendalian program

Sasaran			Realisasi Tahun 2020	Tahun 2022		Capaian Tahun 2022	Kategori
Uraian	Indikator Kinerja	Satuan		Target	Realisasi		
1 Meningkatkan kualitas perencanaan dan pengendalian program	1 Persentase Capaian Indikator kinerja Sasaran Renstra Perangkat Daerah > 80%	%	93,96	81	84,62	104,47	Sangat Tinggi



BAPPELITBANGDA KABUPATEN SAMPANG

Capaian Indikator kinerja sasaran Renstra Perangkat Daerah $\geq 80\%$ sebanyak 77 indikator dari 91 Indikator sasaran dengan target kinerja 81% pada tahun 2022 mencapai target dengan realisasi 104,47%. Dari 91 indikator tersebut terdapat beberapa indikator yang belum realease data kementrian, seperti yang terjadi pada Dinas pendidikan, dimana indikator yang digunakan belum realase dari Kemendiknas.

Berikut kertas kerja evaluasi RENJA-RENSTRA 2022 yang dikerjakan BAPPELITBANGDA Kabupaten Sampang ;

KERTAS KERJA EVALUASI RENJA-RENSTRA 2022 Bappelitbangda Kab. Sampang

NO	KOMPONEN/SUB KOMPONEN	NILAI	BOBOT	Kategori
1	Program dalam Renja konsisten dan selaras dengan RENSTRA dan RPJMD	100	10%	Sangat Baik
2	Kegiatan dalam Renja konsisten dan selaras dengan RENSTRA		10%	Belum Diisi
3	Indikator kinerja program (output) telah memenuhi kriteria SMART		20%	Belum Diisi
4	Kegiatan merupakan cara untuk mencapai sasaran	Y/T	15%	Belum Diisi
5	Anggaran kegiatan dalam dokumen Renja sudah dirasionalkan dengan output yang akan dicapai		15%	Belum Diisi
6	Indikator kinerja kegiatan (output) telah memenuhi kriteria SMART		20%	Belum Diisi
7	Indikator kinerja Program dan Kegiatan dalam dokumen Renja konsisten dengan dokumen Renstra		10%	Belum Diisi
NILAI KUALITAS DOKUMEN PERENCANAAN OPD				Belum Diisi



Kendala :

Persentase dokumen perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas sudah tercapai 100% namun dalam mempertahankan kualitas capaian tersebut terdapat beberapa kendala. Yaitu Fungsi koordinasi perencanaan masih kurang optimal. Selain itu juga dari Faktor Internal : Keterbatasan SDM pada Bappelitbangda dalam melaksanakan fungsi koordinasi perencanaan dan Faktor Eksternalnya : Kurangnya dukungan Perangkat Daerah dalam rangka mewujudkan dokumen perencanaan pembangunan yang berkualitas.

Persentase hasil kajian penelitian dan pengembangan yg dijadikan dasar pembangunan 100% namun dalam prosesnya mengalami beberapa kendala. Diantaranya Terdapat usulan kajian kelitbang Perangkat Daerah yang masih belum terakomodir. Selain itu juga dari Faktor Internal : Keterbatasan SDM Bidang Litbang dan dari Faktor Eksternal : Masih terdapat usulan kajian dari Perangkat Daerah yang belum mengacu pada prioritas pembangunan.

Upaya Mengatasi :

Berbagai upaya terus dilakukan oleh Bappelitbangda Kabupaten Sampang dalam peningkatan ini, diantaranya meliputi :

1. Kebijakan pemerintah baik berupa Undang-undang, Peraturan menteri dan peraturan pendukung lainnya untuk melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan Bappelitbangda secara ideal.
2. Komitmen pemerintah untuk mewujudkan pemerintahan yang akuntabel, efektif dan efisien.
3. Perkembangan ilmu pengetahuan, penelitian dan pengembangan.
4. Perkembangan teknologi dan informasi.



**Tabel 3.3
Pencapaian Kinerja Pelayanan Bappelitbangda Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024**

N O.	INDIKATOR KINERJA SESUAI TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH	Target Ind. Lain	TARGET							REALISASI						CAPAIAN					
			2019	2020	2022	2022	2023	2024	2019	2020	2022	2022	2023	2024	2019	2020	2022	2022	2023	2024	
-1	-2	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22	-23	
1	Persentase Dokumen Perencanaan Pembangunan yang berkualitas																				
a.	Persentase Perangkat Daerah dengan Kualitas Dokumen Perencanaan Baik	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100				100	100	100				
b.	Persentase capaian indikator kinerja sasaran dalam RPJMD $\geq 80\%$	100	80	85	90	95	100	100	98	96	93,96				122,5	90,24	104,40				
2	Meningkatnya kualitas penelitian dan pengembangan																				
a.	Persentase hasil kajian penelitian dan pengembangan yg dijadikan dasar pembangunan	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100				100	100	100				



BAPPELITBANGDA KABUPATEN SAMPANG

1. Persentase Perangkat Daerah dengan Kualitas Dokumen Perencanaan Baik
Konsistensi perencanaan pembangunan menjadi aspek penting agar target pembangunan jangka menengah mampu tercapai. Melalui keselarasan antara perencanaan pembangunan jangka menengah dengan perencanaan pembangunan di setiap tahun berjalan, pembangunan daerah akan lebih terarah sehingga mampu menjadi solusi atas permasalahan dan isu strategis daerah.

Berdasarkan formulasi perhitungannya, Indikator tersebut dihitung berdasarkan

Perangkat Daerah dengan Kualitas Dokumen Perencanaan Baik / Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah x 100%

Kriteria Baik:

1. Berorientasi pada Hasil
 2. Indikator SMART-C (*specific, measurable, achievable, relevant, time bond dan continuously improve*)
 3. Target Jelas
 4. Konsistensi dengan Dokumen Perencanaan Lainnya
program yang terdapat pada dokumen RKPD tahun berjalan dengan jumlah program yang terdapat pada RPJMD 2019-2024. Target indikator Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan sebagaimana tertuang di dalam dokumen Renstra Bappelitbangda Kabupaten Sampang.
2. Persentase capaian indikator kinerja sasaran dalam RPJMD $\geq 80\%$
Berdasarkan formulasi perhitungannya, Indikator tersebut dihitung berdasarkan
Jumlah Indikator kinerja Sasaran Renstra Perangkat Daerah tercapai $\geq 80\%$ / Jumlah Indikator Renstra Perangkat Daerah x 100%
Capaian Indikator kinerja sasaran Renstra Perangkat Daerah $\geq 80\%$ sebanyak 135 indikator dari 149 Indikator sasaran dengan target kinerja 85% pada tahun 2022 mencapai target dengan realisasi 90,24%
 3. Persentase hasil kajian penelitian dan pengembangan yg dijadikan dasar pembangunan
Berdasarkan formulasi perhitungannya, Indikator tersebut dihitung berdasarkan
Jumlah hasil kajian penelitian dan pengembangan yg dijadikan dasar pembangunan / Jumlah hasil kajian penelitian dan pengembangan x 100%

Kajian yang disusun selama tahun 2019 sebanyak 4 kajian yaitu:

- 1) Kajian Pengembangan Ekonomi Wilayah
- 2) Roadmap SIDA
- 3) Kajian Revitalisasi Manajemen Pasar Daerah



BAPPELITBANGDA KABUPATEN SAMPANG

4) Kajian Indeks Toleransi

Kajian tersebut telah ditindaklanjuti oleh perangkat daerah terkait untuk digunakan sebagai acuan penyusunan Program/Kegiatan lanjutan.

Kajian yang disusun selama tahun 2020 sebanyak 4 kajian yaitu:

- Kajian Pengembangan Kawasan Pelabuhan Trunojoyo (Dinas Perhubungan, diajukan dana ke pusat untuk memenuhi sarpras pelabuhan dgn berfungsinya kapal penumpang ke Probolinggo)
- FS Rumah Kemas (Diskopindag, THN 2022 pembangunan rumah kemas dr DAK)
- Kajian Pengembangan Usaha BUMD (bagian perekonomian, rencana PT. GSM untuk pengembangan usaha)

Kajian tersebut telah ditindaklanjuti oleh perangkat daerah terkait untuk digunakan sebagai acuan penyusunan Program/Kegiatan lanjutan. Hasil kajian tersebut digunakan untuk pengambilan keputusan Pemerintah Daerah sesuai dengan bidangnya.

Kajian yang disusun selama tahun 2021 sebanyak 2 kajian yaitu:

- Grand Design Sistem Pertanian Terpadu (Disperta)
- Kajian Pengembangan Bumdes (DPMD)

Kajian tersebut telah ditindaklanjuti oleh perangkat daerah terkait untuk digunakan sebagai acuan penyusunan Program/Kegiatan lanjutan. Hasil kajian tersebut digunakan untuk pengambilan keputusan Pemerintah Daerah sesuai dengan bidangnya.





BAPPELITBANGDA KABUPATEN SAMPANG

Pencapaian Kinerja Pelayanan Bappelitbangda Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024 pada P-RENSTRA BAPPELITBANGDA

NO.	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR	Kondisi Awal Renstra (2018)	Realisasi/Target Kinerja						Kondisi Akhir Renstra (2024)
				2019 (Realisasi)	2020 (Realisasi)	2021 (Realisasi)	2022 (Realisasi)	2023 (Target)	2024 (Target)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Tujuan 1:									
	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	Nilai Perencanaan Kinerja Daerah	74,5	77,13	78,63	78,97	80,05	80,00	80,00	80,00
		Nilai Pengukuran Kinerja Daerah	63,84	67,16	68,56	69,00	70,00	71,00	72,00	72,00
	Sasaran:									
1	Meningkatnya kualitas perencanaan dan pengendalian program	Persentase Perangkat Daerah dengan Kualitas Dokumen Perencanaan Baik	100	100	100	100	100	100	100	100
			Perubahan target kinerja			80	84,62	82	83	83
	Meningkatnya Kualitas Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase Capaian Indikator Kinerja Sasaran RENSTRA ≥ 80%	n/a	100	100	100	100	100	100	100
			Perubahan target kinerja			80	84,62	82	83	83



Tabel 3.5.
Perbandingan Realisasi Kinerja s.d Akhir Periode Renstra

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET AKHIR RENSTRA (TAHUN 2024)	REALISASI TAHUN 2022	TINGKAT KEMAJUAN
-1	-2	-3	-4	-5
Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	Nilai Perencanaan Kinerja Daerah	80	80,5	100,63
	Nilai Pengukuran Kinerja Daerah	72	70	97,22
Meningkatnya kualitas perencanaan dan pengendalian program	Persentase Perangkat Daerah dengan Kualitas Dokumen Perencanaan Baik	83	84,62	101,95
Meningkatnya Kualitas Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase Capaian Indikator kinerja Sasaran RENSTRA Perangkat Daerah \geq 80%	83	84,62	101,95

Dari tabel 3.11 di atas dapat dijelaskan untuk tingkat kemajuan dari akhir Renstra Bappelitbangda Kabupaten Sampang 2019-2024 dapat diperoleh hasil rata-rata baik.

Jika realisasi kinerja tahun 2022 dibandingkan dengan realisasi kinerja level nasional (benchmark kinerja), maka dapat dilihat pada table berikut ini :

Tabel 3.6.
Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Kinerja Nasional

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	REALISASI TAHUN 2022	Realisasi Nasional	KET
-1	-2	-4	-4	-5
Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	Nilai Perencanaan Kinerja Daerah	80,5		Tidak tersedia data
	Nilai Pengukuran Kinerja Daerah	70		Tidak tersedia data



BAPPELITBANGDA KABUPATEN SAMPANG

Meningkatnya kualitas perencanaan dan pengendalian program	Persentase Perangkat Daerah dengan Kualitas Dokumen Perencanaan Baik	84,62		Tidak tersedia data
Meningkatnya Kualitas Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase Capaian Indikator kinerja Sasaran RENSTRA Perangkat Daerah \geq 80%	84,62		Tidak tersedia data

Perbandingan realisasi kinerja Bappelitbangda dengan realisasi kinerja nasional pada tahun 2022 adalah nihil karena tidak tersedia data realisasi kinerja nasional.

B. REALISASI ANGGARAN TAHUN 2022

Berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Bappelitbangda Kabupaten Sampang Tahun 2022, total anggaran belanja tahun 2022 adalah sebesar Rp. 7.523.120.653,00. Anggaran sebesar itu terdiri dari belanja langsung sebesar Rp. 7.523.120.653,00. Belanja langsung digunakan untuk mendanai program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Bappelitbangda Kabupaten Sampang, sebagai penjabaran strategi dan kebijakan sebagaimana yang dimuat dalam dokumen perencanaan. Penganggaran program dan kegiatan pada belanja langsung dilaksanakan untuk mencapai target sasaran, sehingga diharapkan secara langsung akan dapat berpengaruh terhadap pencapaian target sasaran strategis. Sedangkan realisasi belanja APBD Bappelitbangda Kabupaten Sampang tahun 2022 berdasarkan kelompok belanja adalah sebagai berikut :

Tabel 3.7
Realisasi APBD Bappelitbangda Kabupaten Sampang tahun 2022

Uraian	Anggaran (Rp)		
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4(3:2)
BELANJA LANGSUNG	7.523.120.653,00	6.857.785.956,00	91,16
JUMLAH	7.523.120.653,00	6.857.785.956,00	91,16

Akuntabilitas keuangan merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan yang digunakan membiayai kegiatan-kegiatan dalam angka mewujudkan suatu sasaran yang telah ditetapkan, kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Bappelitbangda.



Tabel 3.8
Penyerapan anggaran per sasaran strategis sesuai APBD 2022

No.	SASARAN	URAIAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN		Alokasi Biaya		
				Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
	Meningkatkan kualitas perencanaan dan pengendalian program	PERENCANAAN		6.983.419.432,00	6.340.893.402,00	90,80
	Meningkatkan Kualitas Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	A.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.638.824.470,00	4.347.366.560,00	93,72
		I.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.948.712,00	5.837.970,00	98,14
			1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	590.792,00	526.830,00	89,17
			2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.476.980,00	1.462.680,00	99,03
			3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	488.985,00	484.500,00	99,08
			4 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.425.990,00	1.415.250,00	99,25
			5 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	488.985,00	471.750,00	96,48
			6 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.476.980,00	1.476.960,00	100,00
		II.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.428.099.630,00	3.183.534.072,00	92,87
			1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.425.838.442,00	3.181.305.372,00	92,86
			2 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	412.500,00	395.250,00	95,82
			3 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	432.896,00	430.950,00	99,55

**BAPPELITBANGDA KABUPATEN SAMPANG**

			4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	1.415.792,00	1.402.500,00	99,06
			III.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	182.220.000,00	181.126.000,00	99,40
			1	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	182.220.000,00	181.126.000,00	99,40
			IV.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	390.586.131,00	373.270.121,00	95,57
			1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	18.378.104,00	18.258.733,00	99,35
			2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	26.035.217,00	18.474.450,00	70,96
			3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	62.288.652,00	57.756.887,00	92,72
			4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	32.849.730,00	32.767.507,00	99,75
			5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.840.000,00	3.400.000,00	88,54
			6	Fasilitasi Kunjungan Tamu	11.000.000,00	10.998.000,00	99,98
			7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	236.194.428,00	231.614.544,00	98,06
			V.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	233.071.076,00	230.200.341,00	98,77
			1	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	120.000.000,00	118.800.000,00	99,00
			2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	113.071.076,00	111.400.341,00	98,52
			VI.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	254.603.341,00	241.951.803,00	95,03
			1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.627.341,00	5.595.548,00	99,44
			2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	77.976.000,00	69.406.255,00	89,01
			3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	171.000.000,00	166.950.000,00	97,63
			VII.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	144.055.184,00	131.446.253,00	91,25



BAPPELITBANGDA KABUPATEN SAMPANG

		Pemerintahan Daerah				
		1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	64.608.273,00	55.191.403,00	85,42
		2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	30.228.271,00	28.644.552,00	94,76
		3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	49.218.640,00	47.610.298,00	96,73
		VIII.	Penataan Organisasi	240.396,00	0,00	0,00
			Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	240.396,00	0,00	0,00
	B.	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH		1.105.686.806,00	1.025.144.246,00	92,72
		I	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	727.730.272,00	665.265.222,00	91,42
		1	Pelaksanaan Konsultasi Publik	8.807.500,00	7.961.088,00	90,39
		2	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	14.143.877,00	12.222.500,00	86,42
		3	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	34.021.450,00	28.263.000,00	83,07
		4	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	18.722.300,00	13.647.922,00	72,90
		5	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	652.035.145,00	603.170.712,00	92,51
		II	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	305.138.365,00	293.738.893,00	96,26
		1	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	240.057.490,00	236.614.507,00	98,57
		2	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	48.497.475,00	42.042.636,00	86,69
		3	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	16.583.400,00	15.081.750,00	90,94
		III.	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	72.818.169,00	66.140.131,00	90,83



BAPPELITBANGDA KABUPATEN SAMPANG

			1	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	59.346.429,00	54.833.679,00	92,40
			2	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	13.471.740,00	11.306.452,00	83,93
		C.	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		1.238.908.156,00	968.382.596,00	78,16
		I	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia		469.081.703,00	374.653.551,00	79,87
			1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	137.238.069,00	121.932.599,00	88,85
			2	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	35.898.410,00	26.848.633,00	74,79
			3	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	176.112.637,00	143.403.007,00	81,43
			4	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	119.832.587,00	82.469.312,00	68,82
		II	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)		291.999.660,00	198.648.119,00	68,03
			1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	152.353.257,00	94.489.319,00	62,02
			2	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	4.106.250,00	0,00	0,00



BAPPELITBANGDA KABUPATEN SAMPANG

				3	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	51.020.153,00	35.651.200,00	69,88
				4	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	3.595.000,00	0,00	0,00
				5	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	80.925.000,00	68.507.600,00	84,66
			III.	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan		477.826.793,00	395.080.926,00	82,68
				1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	54.251.284,00	46.063.010,00	84,91
				2	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	3.305.000,00	0,00	0,00
				3	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	60.275.000,00	52.985.920,00	87,91
				4	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	57.634.414,00	48.499.026,00	84,15
				5	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	12.462.500,00	2.893.600,00	23,22
				6	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	289.898.595,00	244.639.370,00	84,39
			PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN			539.701.221,00	516.892.554,00	95,77



BAPPELITBANGDA KABUPATEN SAMPANG

			D.	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	539.701.221,00	516.892.554,00	95,77
			I	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	62.657.695,00	60.431.436,00	96,45
			1	Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	62.657.695,00	60.431.436,00	96,45
			II	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	186.405.840,00	185.238.210,00	99,37
			1	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	186.405.840,00	185.238.210,00	99,37
			III.	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	290.637.686,00	271.222.908,00	93,32
			1	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	238.978.179,00	223.337.888,00	93,46
			2	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbang	51.659.507,00	47.885.020,00	92,69
JUMLAH					7.523.120.653,00	6.857.785.956,00	91,16

Tabel 3.9
Penyerapan anggaran per sasaran strategis sesuai APBD 2022

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
Meningkatnya kualitas perencanaan dan pengendalian program	Persentase Perangkat Daerah dengan Kualitas Dokumen Perencanaan Baik	81	84,62	104,47	7.523.120.653,00	6.857.785.956,00	91,16
	Persentase Capaian Indikator kinerja Sasaran RENSTRA Perangkat Daerah \geq 80%	81	84,62	104,47			

Efisiensi anggaran menunjukkan bagaimana sasaran dengan indikator yang dirumuskan telah berhasil dicapai dengan memanfaatkan sumber daya/ input tertentu. Semakin tinggi jumlah sumber daya yang dikeluarkan untuk mencapai keluaran tertentu, maka



efisiensinya akan semakin rendah. Begitu juga sebaliknya, semakin rendah sumber daya yang dihabiskan untuk mencapai sasaran, maka efisiensi anggarannya akan semakin tinggi.

Banyaknya sasaran yang berhasil dicapai dengan sumber daya yang efisien menunjukkan bahwa efisiensi anggaran telah mencapai tingkat yang tinggi ataupun sangat tinggi. Kondisi ini sejalan dengan prinsip pengelolaan anggaran publik dan lebih jauh, juga sejalan dengan prinsip pemerintahan yang baik, yang salah satunya adalah pengelolaan sumber daya anggaran yang efisien dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan.

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat realisasi dan penyerapan anggaran untuk masing-masing sasaran. Penyerapan anggaran tertinggi pada program/kegiatan di sasaran "Meningkatnya kualitas perencanaan dan pengendalian program", dengan tingkat penyerapan anggaran sebesar 91,16%. Apabila dikaitkan antara kinerja pencapaian sasaran dengan penyerapan anggaran, maka pencapaian sasaran yang relatif baik dan diikuti dengan penyerapan anggaran yang kurang dari 100% menunjukkan bahwa dana yang disediakan untuk pencapaian sasaran strategis pembangunan tahun 2022 telah mencukupi. Dengan membandingkan tingkat capaian target terhadap tingkat penyerapan anggaran, maka dapat diketahui tingkat efektivitas dan efisiensi belanja yang berhasil dilaksanakan.

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa secara umum target kinerja tahun 2022 pada masing-masing sasaran belum berhasil dicapai, terlihat dengan nilai rata-rata capaian kinerja yang belum mencapai 100%. Hal ini mengindikasikan bahwa program dan kegiatan meskipun mungkin telah dilaksanakan dengan baik, namun keluaran dan hasilnya belum efektif dalam mencapai target yang ditetapkan. Pada periode selanjutnya diperlukan adanya peninjauan kembali terhadap pemilihan program dan kegiatan yang dilaksanakan, agar dapat dipilih program dan kegiatan hanya yang benar-benar berkontribusi langsung terhadap pencapaian target sasaran strategis saja yang menjadi program prioritas serta mendapatkan alokasi pendanaan. Demikian pula halnya dengan penyerapan anggaran, terlihat bahwa secara umum terealisasi <100%, sehingga dapat dikatakan bahwa program dan kegiatan sudah dapat dilaksanakan secara efisien, terlihat dari serapan anggaran yang tidak mencapai 100%. Namun demikian tidak dapat dipungkiri bahwa serapan anggaran yang terlalu rendah juga dapat mengindikasikan kemungkinan adanya permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan, sehingga perlu ditelusuri secara lebih cermat untuk kemudian dilakukan analisis pemecahan masalah agar kelak di masa yang akan datang tidak terjadi lagi permasalahan serupa.



BAPPELITBANGDA KABUPATEN SAMPANG

Pengukuran kinerja yang menerapkan reward dan punishment diberikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa anggaran terbesar digunakan untuk melaksanakan indikator Persentase Perangkat Daerah dengan Kualitas Dokumen Perencanaan Baik. Adapun perbandingan capaian kinerja dengan anggaran yang disediakan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.9 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	% CAPAIAN KINERJA	% PENYERAPAN ANGGARAN	KET
-1	-2		-4	-5
Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	Nilai Perencanaan Kinerja Daerah	80,5	91,16	10,66
	Nilai Pengukuran Kinerja Daerah	70		21,16
Meningkatnya kualitas perencanaan dan pengendalian program	Persentase Perangkat Daerah dengan Kualitas Dokumen Perencanaan Baik	84,62		6,54
Meningkatnya Kualitas Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase Capaian Indikator kinerja Sasaran RENSTRA Perangkat Daerah \geq 80%	84,62		6,54

Berdasarkan tabel 3.9 di atas terlihat bahwa secara umum target kinerja BAPPELITBANGDA Kabupaten Sampang tahun 2022 dalam kategori berhasil meskipun pada masing-masing sasaran telah mencapai 100%. Hal ini mengindikasikan bahwa program dan kegiatan meskipun mungkin telah dilaksanakan dengan baik, namun keluaran dan hasilnya belum efektif dalam mencapai target yang ditetapkan. Pada periode selanjutnya diperlukan adanya peninjauan kembali terhadap pemilihan program dan kegiatan yang dilaksanakan, agar dapat dipilih program dan kegiatan hanya yang benar-benar berkontribusi langsung terhadap pencapaian target sasaran strategis saja yang menjadi program prioritas serta mendapatkan alokasi pendanaan.



BAPPELITBANGDA KABUPATEN SAMPANG

Demikian pula halnya dengan penyerapan anggaran, terlihat bahwa secara umum realisasi <100%, sehingga dapat dikatakan bahwa program dan kegiatan sudah dapat dilaksanakan secara efisien, terlihat dari serapan anggaran yang tidak mencapai 100%. Namun demikian tidak dapat dipungkiri bahwa serapan anggaran yang terlalu rendah juga dapat mengindikasikan kemungkinan adanya permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan, sehingga perlu ditelusuri secara lebih cermat untuk kemudian dilakukan analisis pemecahan masalah agar kelak di masa yang akan datang tidak terjadi lagi permasalahan serupa.

C. TINDAK LANJUT LAPORAN HASIL EVALUASI

Beberapa upaya yang dilakukan sebagai tindak lanjut Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

REKOMENDASI HASIL EVALUASI SAKIP TAHUN 2020		TINDAK LANJUT
A	PERENCANAAN KINERJA	
	Pada pemenuhan perencanaan strategis, kualitas Renstra hingga implementasi Renstra telah memenuhi kriteria namun terdapat beberapa kondisi yang tidak memenuhi	Telah dilakukan P-Renstra tiap tiap OPD yang dilakukan oleh BAPPELITBANGDA dan telah ditindaklanjuti dengan Review oleh Inspektorat Daerah dimana P-RENSTRA dan Review ini mencakup dari indikator Tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan
B	PENGUKURAN KINERJA	
	Belum terdapat mekanisme pengumpulan data kinerja sehingga penyajian data pada laporan kinerja tidak dapat diyakini validitasnya dan keandalannya	Telah terdapat alat ukur pengumpulan data seperti yang disajikan pada lampiran LKJiP
	Pengukuran kinerja belum dikembangkan menggunakan teknologi informasi Implementasi Kinerja	Pengukuran kinerja belum dikembangkan menggunakan teknologi informasi Implementasi Kinerja.
	Target Kinerja Persentase Perangkat Daerah Dengan Kualitas Dokumen Perencanaan Baik belum berdasarkan basis data yang memadai karena hasil dari evaluasi SAKIP SKPD Tahun 2020 masih terdapat SKPD yang belum memenuhi kriteria kualitas dokumen perencanaan baik	Telah dilakukan P-Renstra tiap tiap OPD yang dilakukan oleh BAPPELITBANGDA dan telah ditindaklanjuti dengan Review oleh Inspektorat Daerah
	Belum ada penjelasan kondisi eksisting jumlah perangkat daerah dengan kualitas dokumen perencanaan baik	Telah ada penjelasan kondisi eksisting jumlah perangkat daerah dengan kualitas dokumen perencanaan baik



BAPPELITBANGDA KABUPATEN SAMPANG

	Hasil pengukuran kinerja mulai dari setingkat edselon I keatas belum dikaitkan dengan (dimanaatkan sebagai dasar pemberian)reward dan punishment	Reward dan punishment telah diterapkan (Reward dan punishment : potongan TPP
C	PELAPORAN KINERJA	
	Informasi kinerja belum sepenuhnya digunakan dalam pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja yakni dalam hal : <ul style="list-style-type: none">• Perbaikan perencanaan• Untuk menilai dan memperbaiki pelaksanaan program dan kegiatan organisasi• Untuk peningkatan kinerja• Informasi yang disajikan telah igunakan untuk penilaian kinerja	Informasi kinerja telah sepenuhnya digunakan dalam pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja yakni dalam hal : <ul style="list-style-type: none">• Perbaikan perencanaan• Untuk menilai dan memperbaiki pelaksanaan program dan kegiatan organisasi• Untuk peningkatan kinerja• Informasi yang disajikan telah igunakan untuk penilaian kinerja Perbaikannya dapat dilihat pada P-RENSTRA BAPPELITBANGDA, dimana indikator tujuan telah diubah sesuai hasil rekomendasi SAKIP
		Hanya saja, untuk pengukuran kinerja 2022 masih memakai indikator yang lama

Inovasi Bappelitbangda Kabupaten Sampang diantaranya :

1. SIG4TA

Pemerintah Daerah : Kabupaten Sampang

Organisasi Perangkat Daerah : Bappelitbangda Kabupaten Sampang

Nama Inovasi : SIG4TA (Sistem Integrasi Geospasial untuk Sampang Satu Data)

Bentuk Inovasi : Aplikasi Data dan Informasi Geospasial

Inovasi Dimulai : Juni 2022

Latar Belakang:

UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menyebutkan bahwa kegiatan pembangunan harus direncanakan berdasarkan data spasial dan data non-spasial serta informasi lainnya yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, dalam UU No. 17 Tahun 2007 tentang RPJPN 2005-2025 menegaskan bahwa aspek wilayah/spasial haruslah diintegrasikan dan menjadi bagian dari kerangka perencanaan pembangunan di semua tingkatan pemerintahan.

Sebelum era teknologi informasi, pengolahan data geospasial masih secara manual dalam peta kertas. Pencatatan ini menimbulkan kesulitan ketika di lakukan pencarian data.



BAPPELITBANGDA KABUPATEN SAMPANG

Selain itu data yang tersimpan dalam dokumen rentan terhadap kondisi usia kertas. Sejalan dengan mulai diperkenalkannya komputer untuk mendukung kegiatan operasional, banyak pengolahan data spasial mulai beralih dari sistem manual ke sistem yang berbasis komputer atau yang dikenal dengan sistem informasi geografis. Hal dimaksud dilakukan untuk mempermudah pengolahan serta penyajian informasi berbasis data spasial.

Pengolahan data geospasial selanjutnya mengalami perkembangan seiring dengan munculnya pendekatan geoportal. Geoportal dibuat untuk mempermudah aktivitas manajemen data spasial dimana sekumpulan data spasial tersebut saling terhubung, dapat digunakan secara bersamaan oleh banyak pengguna dan dibentuk untuk dapat menghasilkan informasi geospasial yang mudah diakses baik oleh instansi maupun masyarakat melalui internet (website). Oleh karena itu integrasi geospasial dalam satu geoportal menjadi hal yang sangat strategis dalam akurasi informasi pembangunan daerah. Integrasi geospasial sangat penting dalam mendukung keberhasilan pembangunan daerah serta mendukung One Map Policy (Kebijakan Satu Peta) dan perwujudan Satu Data Indonesia.

Kabupaten Sampang merupakan salah satu kabupaten yang terletak di Pulau Madura, dengan luas wilayah mencapai 1.233,33 km² dibagi menjadi 14 kecamatan dan 186 desa/kelurahan dengan berbagai potensi sumber daya alam yang dapat dikelola untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Kabupaten Sampang sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Sampang Nomor 59 tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sampang, mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan serta Tugas Pembantuan.

Penyediaan data dan informasi geospasial di Kabupaten Sampang saat ini masih terbatas pada beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan sebagian besar belum dibangun dengan standart dan referensi yang sama (belum valid) dan tidak aktual (tidak sesuai dengan kondisi saat ini). Kendala lain adalah belum sinkronnya data yang ada pada berbagai institusi, sehingga data-data yang seharusnya saling berhubungan banyak terpisah-pisah dan sulit untuk diakses serta tidak terintegrasi. Keadaan di atas akan berpengaruh pada proses perencanaan pembangunan yang tidak sesuai dengan kebutuhan di lapangan karena terkadang ditemukan tumpang tindih program sehingga menyebabkan pengambilan kebijakan yang ditempuh tidak optimal. Untuk mewujudkan akurasi informasi pembangunan daerah, maka diperlukan penyelenggaraan informasi geospasial daerah yang dibangun dalam satu sistem yang



BAPPELITBANGDA KABUPATEN SAMPANG

memungkinkan mengintegrasikan data dalam satu basis data dan satu sistem referensi, memiliki standart data sesuai dengan kebijakan Satu Peta, memiliki metadata, serta memiliki kemampuan untuk berbagi pakai data/atau dipertukarkan antar sistem yang saling berinteraksi serta dapat diakses secara mudah dalam satu geoportal, mudah diakses dan dibagipakaikan. Penyelenggaraan informasi geospasial daerah harus didukung oleh Sumber Daya Manusia yang terlatih dan handal.

Tujuan dan Manfaat :

Tujuan:

1. Tujuan Jangka Pendek yang akan dicapai adalah:
 - 1) Penetapan komitmen bersama antar OPD untuk membangun data dan informasi berbasis spasial yang valid dan aktual;
 - 2) Penetapan regulasi terkait dengan pelaksanaan integrasi geospasial berupa Keputusan Bupati dan Peraturan Bupati;
 - 3) Penyediaan online platform yang memungkinkan untuk pengintegrasian informasi geospasial, memiliki kemampuan untuk berbagipakai dan dapat diakses secara mudah;
 - 4) Penyiapan Sumberdaya Manusia SDM/Simpul Jaringan untuk pengelolaan data dan informasi geospasial;
 - 5) Pengimplementasian integrasi geospasial dan pengembangan metadata pada 3 (tiga) OPD.
2. Tujuan Jangka Menengah yang akan dicapai adalah:
 - 1) Peningkatan produksi data spasial pada 10 (sepuluh) OPD;
 - 2) Peningkatan kapasitas SDM untuk pengelolaan data dan informasi geospasial;
 - 3) Peningkatan infrastruktur pendukung teknologi pusat data geospasial.
3. Tujuan Jangka Panjang yang akan dicapai adalah:
 - 1) Pengembangan produksi data spasial pada seluruh OPD dan penambahan metadata;
 - 2) Pengembangan sistem data spasial yang terintegrasi secara luas pada beberapa sektor dengan platform geoportal;
 - 3) Pengembangan kebijakan perencanaan pembangunan wilayah.

Manfaat:

1. Manfaat Internal
 - 1) Meningkatkan akurasi perencanaan pembangunan dengan penyediaan data berbasis spasial;
 - 2) Meningkatkan capaian kinerja Bappelitbangda;



BAPPELITBANGDA KABUPATEN SAMPANG

- 3) Meningkatkan kapasitas Sumber daya Perencana di daerah;
 - 4) Mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Sampang.
2. Manfaat External
- 1) Meningkatkan kinerja organisasi perangkat daerah dengan pengendalian dan evaluasi secara berkala;
 - 2) Memberikan informasi yang real time kepada pembuat kebijakan;
 - 3) Mendorong terwujudnya kebijakan satu data geospasial (One Map Policy) sebagai alat pemantauan dan evaluasi pembangunan daerah oleh masyarakat;
 - 4) Mendorong kepastian usaha dan kemudahan berinvestasi bagi para pelaku usaha baik dari dalam negeri maupun luar negeri melalui penyediaan data dan informasi yang aktual;
 - 5) Mendorong keterbukaan informasi publik melalui manajemen data spasial yang mudah diakses oleh siapapun serta memiliki kemampuan dalam berbagi data.

Hasil Inovasi:

Hasil dengan adanya aplikasi SIG4TA ini yaitu: **Pertama**, Data Geospasial (DG) dan Informasi Geospasial (IG) dibangun dengan standar dan referensi yang sama serta aktual. **Kedua**, Penyediaan data dan informasi geospasial memiliki banyak metadata. **Ketiga**, data terintegrasi dalam satu sistem geoportal sehingga mudah diakses dan dibagipakaikan. Dan yang **Keempat**, terdapat simpul jaringan pada setiap OPD yang terlatih. Kemudian, untuk memberikan payung hukum dalam pelaksanaan inovasi ini serta kelanjutannya maka kondisi yang diharapkan yang **Kelima** yaitu disusunnya regulasi yang mengatur Penyelenggaraan Informasi Geospasial Daerah.

Isian Indikator

NO	Indikator Inovasi	Keterangan	Informasi
1	Regulasi Inovasi Daerah	Regulasi / Kebijakan yang ditetapkan untuk mendukung Inovasi Daerah	SK OPD
2	Ketersediaan SDM Terhadap Inovasi Daerah	Jumlah SDM yang melaksanakan inovasi daerah ini. jumlahnya ada berapa orang.	1-50 SDM
3	Dukungan Anggaran	Anggaran untuk inovasi daerah dituangkan dalam APBD	Anggaran untuk kegiatan inovasi sudah ada sampai tahap pelaksanaan inovasi
4	Penggunaan IT	Penggunaan alat elektronik, teknologi dan sistem informasi dalam inovasi	Pelaksanaan kerja di lingkungan pemerintah daerah



BAPPELITBANGDA KABUPATEN SAMPANG

		daerah	menggunakan perangkat elektronik
5	Bimtek Inovasi	Suatu kegiatan yang diberikan pengguna inovasi daerah kepada pelatihan yang bermanfaat dalam meningkatkan inovasi daerah	Pemerintah daerah Sudah melakukan Bimtek inovasi daerah
6	Program Dan Kegiatan Di Renstra OPD	Inovasi Daerah masuk dalam program dan kegiatan Renstra OPD	Pemerintah daerah sudah menuangkan rencana pengembangan inovasi ke dalam Resntra
7	Jejaring Inovasi	Interaksi antar pelaku inovasi daerah. misalkan antar OPD, antar Pemda, atau melibatkan pelayanan publik	Inovasi hanya berjalan di OPD tertentu
8	Replikasi	Inovasi daerah yang telah berhasil direplikasi ke daerah lain	Belum pernah direplikasi
9	Pedoman Teknis	Ketentuan dasar yang memberi arah bagaimana inovasi daerah harus dilakukan	Sudah ada pedoman dan panduan teknis pengembangan inovasi daerah dan dapat diakses secara daring
10	Pengelola Inovasi	Pengelola inovasi ditetapkan dengan Surat Keputusan	Ditetapkan dengan SK OPD
11	Ketersediaan Informasi Layanan	Kesiapan informasi layanan untuk dapat digunakan	ada ketersediaan informasi secara elektronik
12	Penyelesaian Layanan Pengaduan	Penyelesaian informasi/ pemberitahuan yang disampaikan oleh pengguna tentang inovasi daerah	Pengaduan pengguna semua direspon dengan baik
13	Tingkat Partisipasi Stakeholder	Tindakan pihak pihak tertentu dalam mengambil bagian pada kegiatan inovasi daerah	Belum ada pelibatan masyarakat & stakeholders dalam pengembangan inovasi daerah
14	Kemudahan Informasi Layanan	Tidak memerlukan banyak tenaga untuk memperoleh informasi layanan	Layanan Telp
15	Kemudahan Proses Inovasi Yang Dihasilkan	Tidak memerlukan banyak tenaga untuk melakukan inovasi	Sederhana
16	Online Sistem	Jaringan prosedur yang dibuat secara daring	Inovasi daerah dilakukan secara elektronik
17	Kecepatan Inovasi	Proses yang digunakan untuk mengakses inovasi daerah dalam satuan waktu. yang dimaksud sangat lambat (waktunya pengerjaannya kurang dari 6 bulan)	Proses pelayanan publik oleh pemerintah daerah sudah cukup cepat



BAPPELITBANGDA KABUPATEN SAMPANG

		yang dimaksud cukup cepat (waktunya pengerjaannya kurang dari 12 bulan) yang dimaksud lambat (waktunya pengerjaannya lebih dari 12 bulan)	
18	Kemanfaatan Inovasi	Inovasi daerah yang dihasilkan bermanfaat dan tidak menimbulkan pembenanan daerah	Ada manfaat dan tidak menimbulkan pembebanan daerah
19	Tingkat Kepuasan penggunaan inovasi daerah	Ketersediaan tingkat kepuasan inovasi daerah dapat dirasakan sesuai dengan yang diharapkan pengguna	hasil pengukuran kepuasan pengguna belum tersedia
20	Sosialisasi Kebijakan	Penyebarluasan informasi kebijakan inovasi daerah dari pemerintahan daerah kepada pengguna inovasi daerah (pengguna dapat Pegawai ASN atau Masyarakat) dengan mengunggah foto kegiatan inovasi daerah dan/atau pelaksanaan inovasi dimaksud.	Sosialisasi dilakukan di tingkat Kabupaten dan Desa dan disebarluaskan melalui media massa (surat kabar)
21	Kualitas Inovasi Daerah	Kualitas inovasi Daerah dapat dibuktikan dengan video inovasi daerah (file MP4, Mov atau Avi)	Durasi video 5 menit dan apabila melebihi dapat dibagi menjadi 2 part. Memuat substansi berupa latar belakang, metode pemecahan masalah, ideation, strategi pemecahan masalah (solusi inovatif),

2. LITBANG BERBAGI

Pemerintah Daerah : Kabupaten Sampang

Organisasi Perangkat Daerah : Bappelitbangda Kabupaten Sampang

Nama Inovasi : LITBANG BERBAGI

Bentuk Inovasi : Tata Kelola Pemerintahan

Inovasi Dimulai : Tahun 2018 s/d sekarang

Latar Belakang:

Dalam rangka meningkatkan kualitas regulasi dan kebijakan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sampang dan perlu dilakukan penelitian dan pengembangan penyelenggaraan tugas pemerintahan secara terarah, terkoordinasi, terpadu, dan berkesinambungan, maka telah ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah.



BAPPELITBANGDA KABUPATEN SAMPANG

Permasalahan sering terjadi, antara lain adalah :

- Belum adanya standar, kriteria dan prosedur yang baku pada pelaksanaan kelitbangan.
- Belum adanya petunjuk operasional yang baku bagi para pelaku kelitbangan.
- Belum sinkronnya perencanaan kegiatan dan anggaran kelitbangan di lingkungan Pemerintah Kabupaten.

Salah satu upaya untuk mengoptimalkan kelitbangan tersebut, diperlukan adanya suatu petunjuk teknis operasional pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan yang sederhana dan mudah dipahami.

Tujuan dan Manfaat :

Tujuan:

Bertujuan menghasilkan pemahaman baru dan mengembangkan penerapan praktis, nilai dan konteks ilmu pengetahuan yang baru atau cara baru dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri di lingkungan Pemerintahan Daerah. Terdapat 4 (empat) tujuan Inovasi Research and Development Center (RDC) PPU yaitu:

RDC sebagai Pusat Data Kajian

RDC sebagai pusat Analisa Kebijakan

RDC sebagai Pusat Cipta Opini

RDC sebagai Pusat Penelitian Partisipatif Universitas (non budget)

Manfaat:

Manfaat yang diperoleh dengan adanya pusat kajian kelitbangan daerah atau Litbang Berinovasi ini dimaksudkan agar dalam pengambilan kebijakan daerah bertumpu kepada hal – hal yang bersifat fakta dan analisa. Kajian tidak sebatas potensi sumber daya alam tetapi juga mengenai sumber daya manusia serta kajian sosekbud. Selain itu Litbang akan memberi kemudahan akses bagi lembaga manapun untuk melakukan riset di Kabupaten Penajam Paser Utara sehingga akan memperkaya data riset/kajian daerah.

Hasil Inovasi: SABERNOVA

Isian Indikator :

NO.	INDIKATOR INOVASI	KETERANGAN	INFORMASI	DATA PENDUKUNG
-----	-------------------	------------	-----------	----------------



BAPPELITBANGDA KABUPATEN SAMPANG

1	Regulasi Inovasi Daerah	Regulasi / Kebijakan yang ditetapkan untuk mendukung Inovasi Daerah	SK OPD	Dokumen SK/Peraturan
2	Ketersediaan SDM Terhadap Inovasi Daerah	Jumlah SDM yang melaksanakan inovasi daerah ini. jumlahnya ada berapa orang.	1-50 SDM	SK Kegiatan
3	Dukungan Anggaran	Anggaran untuk inovasi daerah dituangkan dalam APBD	Anggaran untuk kegiatan inovasi sudah ada sampai tahap pelaksanaan inovasi	Dokumen Anggaran
4	Penggunaan IT	Penggunaan alat elektronik, teknologi dan sistem informasi dalam inovasi daerah	Pelaksanaan kerja di lingkungan pemerintah daerah menggunakan perangkat elektronik	Foto Kegiatan/gambar
5	Bimtek Inovasi	Suatu kegiatan yang diberikan pengguna inovasi daerah kepada pelatihan yang bermanfaat dalam meningkatkan inovasi daerah	Pemerintah daerah Sudah melakukan Bimtek inovasi daerah	Foto Kegiatan/Screenshot
6	Program Dan Kegiatan Di Renstra OPD	Inovasi Daerah masuk dalam program dan kegiatan Renstra OPD	Pemerintah daerah sudah menuangkan rencana pengembangan inovasi ke dalam Renstra	Dokumen Renstra
7	Jejaring Inovasi	Interaksi antar pelaku inovasi daerah. misalkan antar OPD, antar Pemda, atau melibatkan pelayanan publik	Inovasi hanya berjalan di OPD tertentu	Dokumen Laporan/Foto Kegiatan
8	Replikasi	Inovasi daerah yang telah berhasil direplikasi ke daerah lain	Belum pernah direplikasi, pernah direplikasi 1kali dst	Dokumen Kerjasama
9	Pedoman Teknis	Ketentuan dasar yang memberi arah bagaimana inovasi daerah harus dilakukan	Sudah ada pedoman dan panduan teknis pengembangan inovasi daerah dan dapat diakses secara daring	Dokumen Laporan/Foto Kegiatan/Gambar
10	Pengelola Inovasi	Pengelola inovasi ditetapkan dengan Surat Keputusan	Ditetapkan dengan SK OPD	Dokumen Laporan/Foto Kegiatan/Gambar



BAPPELITBANGDA KABUPATEN SAMPANG

11	Ketersediaan Informasi Layanan	Kesiapan informasi layanan untuk dapat digunakan	ada ketersediaan informasi secara elektronik	Dokumen Laporan/Foto Kegiatan/Gambar
12	Penyelesaian Layanan Pengaduan	Penyelesaian informasi/ pemberitahuan yang disampaikan oleh pengguna tentang inovasi daerah	Pengaduan pengguna semua direspon dengan baik dg adanya Call Center / Medsos/ Aplikasi Pengaduan	Dokumen Laporan/Foto Kegiatan/Gambar
13	Tingkat Partisipasi Stakeholder	Tindakan pihak pihak tertentu dalam mengambil bagian pada kegiatan inovasi daerah	Sudah ada pelibatan Masyarakat/ Masyarakat dan Akademisi/Masyarakat, Akademisi dan Media	Dokumen Laporan/Foto Kegiatan/Gambar
14	Kemudahan Informasi Layanan	Tidak memerlukan banyak tenaga untuk memperoleh informasi layanan	Layanan Telp/ Email/Aplikasi Online	Dokumen Laporan/Foto Kegiatan/Gambar
15	Kemudahan Proses Inovasi Yang Dihasilkan	Tidak memerlukan banyak tenaga untuk melakukan inovasi	Dapat dilakukan dalam waktu 8 hari keatas,/3-7 hari/1-2 hari	Dokumen Laporan/Foto Kegiatan/Gambar
16	Online Sistem	Jaringan prosedur yang dibuat secara daring	Inovasi daerah dilakukan secara elektronik ukungan melalui web/Sosmed/ Perangkat / Web dan Aplikasi Mode Android/IOS	Dokumen Laporan/Foto Kegiatan/Gambar
17	Kecepatan Inovasi	Proses yang digunakan untuk mengakses inovasi daerah dalam satuan waktu. yang dimaksud sangat lambat (waktunya pengerjaanya kurang dari 6 bulan)	Proses pelayanan publik oleh pemerintah daerah sudah cukup cepat	Dokumen Laporan/Foto Kegiatan/Gambar
		yang dimaksud cukup cepat (waktunya pengerjaanya kurang dari 12 bulan)		



BAPPELITBANGDA KABUPATEN SAMPANG

		yang dimaksud lambat (waktunya pengerjaanya lebih dari 12 bulan)		
18	Kemanfaatan Inovasi	Inovasi daerah yang dihasilkan bermanfaat dan tidak menimbulkan pembenanan daerah	Ada manfaat dan tidak menimbulkan pembebanan daerah	Dokumen Laporan/Foto Kegiatan/Gambar
19	Tingkat Kepuasan penggunaan inovasi daerah	Ketersediaan tingkat kepuasan inovasi daerah dapat dirasakan sesuai dengan yang diharapkan pengguna	hasil pengukuran kepuasan pengguna belum tersedia	Dokumen Laporan/Foto Kegiatan/Gambar
20	Sosialisasi Kebijakan	Penyebarluasan informasi kebijakan inovasi daerah dari pemerintahan daerah kepada pengguna inovasi daerah (pengguna dapat Pegawai ASN atau Masyarakat) dengan mengunggah foto kegiatan inovasi daerah dan/atau pelaksanaan inovasi dimaksud.	Sosialisasi dilakukan di tingkat Kabupaten dan Desa dan disebarluaskan melalui media massa (surat kabar)	Dokumen Laporan/Foto Kegiatan/Gambar
21	Kualitas Inovasi Daerah	Kualitas inovasi Daerah dapat dibuktikan dengan video inovasi daerah (file MP4, Mov atau Avi)	Durasi video 5 menit dan apabila melebihi dapat dibagi menjadi 2 part.	
			Memuat substansi berupa latar belakang, metode pemecahan masalah, ideation, strategi pemecahan masalah (solusi inovatif),	



BAPPELITBANGDA KABUPATEN SAMPANG

BAB IV

PENUTUP


Dalam rangka memenuhi salah satu kewajiban Bappelitbangda Kabupaten Sampang untuk menyampaikan pertanggungjawaban tugas dan fungsinya selama Tahun Anggaran 2022 maka disusunlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang merupakan cerminan dari hasil kinerja Bappelitbangda selama satu tahun dan diukur melalui pencapaian target kinerja yang ditetapkan dalam lampiran penetapan kinerja tahun 2022.

Hasil kinerja Bappelitbangda Kabupaten Sampang selama tahun 2022 tertuang dalam lampiran pengukuran kinerja. Dalam form tersebut dapat diketahui pencapaian target indikator kinerja sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam Renstra Bappelitbangda Kabupaten Sampang Tahun 2020 – 2024. Berdasarkan form tersebut rata-rata hasil kinerja Bappelitbangda Kabupaten Sampang sangat tinggi, karena capaian kerjanya mencapai 96,74%.

Dalam pencapaian tersebut tentu tidak terlepas dari hambatan-hambatan teknis yang dihadapi. Akan tetapi, Bappelitbangda Kabupaten Sampang sudah berupaya seoptimal mungkin untuk mengatasi hambatan tersebut dengan melakukan koordinasi dan asistensi dengan pihak-pihak yang kompeten. Semoga Laporan kinerja ini dapat memberikan informasi dan menjadi acuan peningkatan kinerja aparatur Bappelitbangda pada tahun-tahun berikutnya.

Demikian laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Bappelitbangda Kabupaten Sampang Tahun 2022, semoga dapat memberikan gambaran tentang capaian kinerja Bappelitbangda dan sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kinerja dan anggaran Tahun 2022. Untuk itu pula dengan segala kekurangan dan keterbatasan yang ada diharapkan masukan dan saran guna perbaikan dalam kinerja maupun dalam penyusunan laporan ini di masa mendatang

Sampang, Januari 2023
Kepala Bappelitbangda Kab. Sampang



Dr. UMI HANIK LAILA, MM
Pemhina Utama Muda
NIP. 19661202 199303 2 004